

**PERANAN PEMERINTAH DAERAH DALAM
MENINGKATKAN PEREKONOMIAN DI SUBSEKTOR
PERTANIAN TANAMAN PANGAN KABUPATEN GOWA
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

SKRIPSI

**OLEH
MUTMAINNA
105710197714**



**PROGRAM STUDI ILMU EKONOMI STUDI PEMBANGUNAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
2018**

SKRIPSI

**PERANAN PEMERINTAH DAERAH DALAM
MENINGKATAKAN PEREKONOMIAN DI SUBSEKTOR
PERTANIAN TANAMAN
PANGAN KABUPATEN GOWA PROVINSI
SULAWESI SELATAN**

MUTMAINNA

105710197714

**Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Guna Memperoleh Gelar Sarjana
Ekonomi Pada Jurusan Ilmu Ekonomi Studi Pembangunan**

**JURUSAN ILMU EKONOMI STUDI PEMBANGUNAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
MAKASSAR
2018**



**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

Jl. Sultan Alauddin No. gedung iqra Lt.7 Tel. (0411) 866972 Makassar 90221

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

LEMBAR PERSETUJUAN

Judul Penelitian : "Peranan Pemerintah Daerah Dalam Meningkatkan
Perekonomian Pada Subsektor Pertanian Tanaman
Pangan Kabupaten Gowa Provinsi Sulawesi Selatan".

Nama : Mutmainna
Stambuk / Nim : 105710197714
Program studi : Ilmu Ekonomi Studi Pembangunan
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis
Perguruan Tinggi : Universitas Muhammadiyah Makassar

Menyatakan bahwa skripsi ini telah diteliti, diperiksa dan diujikan di
depan panitia penguji skripsi strata satu (S1) Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Muhammadiyah Makassar pada hari Selasa 21 Agustus 2018 M.

Makassar, 21 Agustus 2018

Disetujui Oleh

Pembimbing I,

Dr. H. Ansyarif Khalid SE, M.Si, AK, CA
NIDN: 02916096601

Pembimbing II,

A. Nur Fitrianti SE, M.Si
NBM: 1288675

Dekan,

Ismail Rusulorg, SE, MM
NBM: 903 078

Diketahui

Ketua Program Studi,

Hj. Naidah, SE, M. Si
NBM: 710 551



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS JURUSAN IESP
Jl. Sultan Alauddin No. gedung iqra Lt.7 Tel. (0411) 866972 Makassar 90221

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi atas Nama Mutmainna, Nim 105710197714, diterima dan disahkan oleh Panitia Ujian Skripsi berdasarkan Surat Keputusan Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar Nomor :0006/SKY/60201/091004/2018, Tanggal 09 Dzulhijjah 1439 H/ 21 Agustus 2018 M, sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar **Sarjana Ekonomi** pada Program Studi Ilmu Ekonomi Studi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.

09 Dzulhijjah 1439 H
Makassar,
21 Agustus 2018 M

PANITIA UJIAN

1. Pengawas Umum : Dr. H. Abdul Rahman Rahim, SE, MM
(Rektor Unismuh Makassar)
2. Ketua : Ismail Rasulong, SE, MM
(Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis)
3. Sekretaris : Dr. Agus Salim HR, SE, MM
(WD I Fakultas Ekonomi dan Bisnis)
4. Penguji : 1. Hj. Naidah, SE, M.Si
2. Dr. Akhmad SE, M.Si
3. Asriat SE, M.,Si
4. Muh. Nur R, SE, MM

Disahkan oleh,
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Muhammadiyah Makassar

Ismail Rasulong, SE, MM
NBM : 903078



PERSEMBAHAN

Sujud syukur ku persembahkan pada ALLAH yang maha kuasa, berkat dan rahmat detak jantung, denyut nadi, nafas dan putaran roda kehidupan yang diberinya hingga saat ini saya dapat mempersembahkan skripsiku pada orang-orang yang tersayang :

Kedua orang tuaku tercinta yang tak pernah lelah membersarkanku dengan penuh kasih sayang, serta memberi dukungan, perjuangan, motivasi, dan pegorbanan dalam hidup. Terima kasih buat ibu dan bapak.

Suamiku tercinta yang selalu memberikan dukungan, semangat dan selalu mengisi hari-hariku dengan canda tawa dan kasih sayangnya. Thank's for your love

Kakaku beserta suaminya yang selalu menyemangatiku, memberi motivasi dan dukungan, doa serta rasa sayang dan cintanya yang begitu indah buatku. Terima kasih kakak.

Sahabat seperjuanganku yang selalu memberi semangat dan dukungan serta canda tawa yang sangat mengesankan selama perkuliahan, susah senang di rasakan bersama, terima kasih buat kalian semua.

MOTTO HIDUP

Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan dan kesalahan bukan kegagalan tapi bukti bahwa seseorang sudah melakukan sesuatu

KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah penulis panjatkan ke hairat Allah SWT atas segala rahmat dan hidayah yang tiada henti diberikan kepada hambanya. Shalawat dan salam tak lupa penulis kirimkan kepada Rasulullah SAW beserta para keluarga, sahabat da para pengikutnya. Merupakan nikmat yang tiada ternilai manakala penulisan skripsi yang berjudul “Peranan Pemerintah Daerah Dalam Meningkatkan Perekonomian di Subsektor Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Gowa Provinsi Sulawesi Selatan”

Skripsi yang poenulis buat ini bertujuan untuk memenuhi syarat dalam menyelesaikan program sarjana (S1) pada fakultas ekonomi dan bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.

Teristimewa dan terutama penulis sampaikan ucapan terima kasih kepada kedua orang tua penulis bapak Sempo Dg. Ngempo dan ibu Sayati yang senantiasa memberi harapan, semangat, perhatian, kash sayang dan doa tulus tak pamrih. Dan saudara-saudaraku tercinta yang senantiasa mendukung dan memberikan semangat hingga akhir studi ini. Dan seluruh keluarga besar atas segala pengorbanan, dukungan dan doa restu yang telah di berikan demi keberhasilan penulis dalam menuntut ilmu. Semoga apa yang telah mereka berikan kepada penulis menjadi ibadah dan cahaya penerang kehidupan di dunia dan di akhirat.

Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan dan dorongan dari berbagai pihak. Begitu

pula pengharapan yang setinggi-tingginya dan terima kasih banyak disampaikan dengan hormat kepada :

1. Bapak Dr. H. Abd Rahman Rahim, SE., Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar
2. Bapak Ismail Rosullong, SE., MM, Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Makassar.
3. Ibu Hj. Naidah, SE., MSi., selaku ketua Proram Studi Ilmu Ekonomi Studi Ekonomi Pembangunan Universitas Muhammadiyah Makassar
4. Bapak Dr. H. Ansyarif Khalid, SE, MSi. Ak.CA, selaku pembimbing I yang senantiasa meluangkan waktunya membimbing dan mengarahkan penulis, sehingga skripsi selesai dengan baik.
5. Ibu A. Nur Fitrianti, SE., MSi, selaku pembimbing II yang telah berkenan membantu selama dalam penyusunan skripsi hingga ujian skripsi.
6. Bapak/Ibu dan asisten Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar yang tak kenal lelah banyak menuangka ilmunya kepada penulis selama mengikuti kuliah.
7. Segenap Staf dan Karyawan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.
8. Rekan-Rekan mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Program Studi Ilmu Ekonomi Studi Ekonomi Pembangunan Angkatan 2014 yang selalu belajar bersama yang tidak sedikit bantuannya dan dorongan dalam aktivitas studi penulis.
9. Terima kasih untuk semua kerabat yang tidak bias sya tulis satu p[ersatu yang telah memberikan semangat, kesabaran, motivasi, dan

dukungannya sehingga penulis dapat merampungkan penulisan skripsi ini.

Akhirnya, sungguh penulis sangat menyadari bahwa skripsi ini masih sangat jauh dari kesempurnaan oleh karena itu, kepada semua pihak utamanya para pembaca yang budiman, penulis senantiasa mengharapkan saran dan kritiknya demi kesempurnaan skripsi ini.

Mudah-mudahan skripsi yang sederhana ini dapat bermanfaat bagi semua pihak utamanya kepada almamater kampus biru Universitas Muhammadiyah Makassar.

Billahi Fii Sabilil Haq, Fastabiqul Khairat, Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Makassar, 3 Agustus 2018

Penulis

ABSTRAK

Mutmainna, Tahun 2018. Peranan Pemerintah Daerah Dalam Meningkatkan Perekonomian di Subsektor Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Gowa Provinsi Sulawesi Selatan, Skripsi Program Studi Ilmu Ekonomi Studi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar. Dibimbing oleh pembimbing I Dr. H. Ansyarif Khalid, dan Pembimbing II Nur Fitrianti.

Penelitian ini mempunyai variabel yaitu tingkat pertumbuhan ekonomi. Peranan pemerintah daerah sektor pertanian dan tanaman pangan sekaligus sampel penelitian ini adalah laporan pertumbuhan ekonomi kabupaten Gowa tahun 2012 - 2016. Pengumpulan data dikumpulkan melalui pencatatan langsung pada dinas pertanian melalui instrument pencatatan dan wawancara. Analisis data dilakukan dengan metode kualitatif yaitu secara survey yang bertujuan untuk mengumpulkan data data dan informasi dari sejumlah responden dan informan. Hasil penelitian pertumbuhan ekonomi ini dapat disimpulkan bahwa angka pertumbuhan ekonomi di kabupaten Gowa mengalami fluktuasi pertahunnya dari periode 2012 sampai 2016.

Kata Kunci : Pertumbuhan Ekonomi

ABSTRACT

***Mutmainna ,2018** the role of regional government in improving the economy in the food crops subsector in the regency of Gowa in the province of south Sulawesi. Thesis development economics study program faculty of economics and business department of accounting Muhammadiyah University of Makassar. Guided by supervisor I Dr. H. Ansyarif Khalid, and advisor II A.Nur Fitrianti.*

This study has variable, namely the level of economic growth of the role of local government in the agricultural sector and food crops as well as the sample of this study is the economic growth report of Gowa regency 2012-2016. Data collection was collected through direct recording of the agricultural service through recording and interviewing instruments. Data analysis was carried out with qualitative methods, nsamely in a survey aimed at collecting data and information from a number of respondents and informants. the results of the 2012 economic growth study amounted with this it can be concluded that the rate of economic growth in Gowa district experienced annual fluctuations from 2012 to 2016.

Keywords :Economic Growth

DAFTAR ISI

SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iii
HALAMAN PERSETUJUAN	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
KATA PENGANTAR	vi
ABSTRAK BAHASA INDONESIA.....	vii
ABSTRACT.....	viii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR GAMBAR	xii
BAB I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Manfaat Penelitian	6
BAB II. TINJAUAN PUSTAKA	7
A. Peran Pemerintah	7
B. Ketahanan Pangan	34
C. Pembangunan Sektor Pertanian	36
D. Kebijakan pemerintah	38
E. Peranan Masyarakat.....	40
F. Ekonomi Daerah	41

G. Produktivitas Petani	42
H. Tinjauan Empiris	45
I. Kerangka Konsep.....	45
BAB III. METODE PENELITIAN	47
A. Jenis dan Waktu Penelitian.....	47
B. Pengumpulan Data	47
C. Defenisi Operasional Variabel	48
D. Metode Analisis	48
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	49
A. Gambaran Umum Kabupaten Gowa	49
B. Struktur Organisasi	54
C. Program Pemerintah Dalam Pembangunan	57
D. Factor-Faktor Pendukung Dalam Meningkatkan Perekonomian Pada Sub Sektor Pertanian	60
E. Peran Dan Arahan Pemerintah Dalam Pelaksanaan Pembangunan Di Kabupaten Gowa	66
F. Manfaat Sektor Pertanian Bagi Masyarakat.....	69
BAB VI PENUTUP.....	71
A. Simpulan	71
B. Saran.....	72
DAFTAR PUSTAKA.....	73

DAFTAR TABEL

Nomor	Judul	Halaman
Table 1	Pertumbuhan Produksi, Luas Panen Dan Produktivitas Padi Di Indonesia 2013 – 2017	2
Table 2	Ibu Kota Kecamatan, Jarak Dan Luas Kecamatan	51
Table 5.1	Luas Lahan Sawah Menurut Jenis Pengairan Di Kabupaten Gowa (Ha)	62
Tabel 5.2	Luas Panen Produksi Dan Hasil Perhektar Tanaman Pangan Di Kabupaten Gowa 2012 – 2016	63
Table 5.3	Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Gowa 2011 – 2016	64
Table 5.4	Perkembangan Pdrb Kabupaten Gowa 2011 – 2016	65
Table 5.5	Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Gowa 2011 – 2016	66

DAFTAR GAMBAR

Nomor	Judul	Halaman
Gambar 1	Bagan Kerangka Konsep	2

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pemerintah Daerah mempunyai peranan penting dalam pembangunan pada semua sektor untuk kepentingan masyarakat dan daerah itu sendiri serta negara. Menurut Fitriani (2013), masalah pokok dalam pembangunan daerah adalah terletak pada penekanan terhadap kebijakan-kebijakan pembangunan yang didasarkan pada kekhasan daerah yang bersangkutan (*endogenous development*) melalui penggunaan potensi sumberdaya manusia, kelembagaan, dan sumberdaya fisik secara lokal (daerah). Orientasi ini bertujuan untuk menciptakan kesempatan kerja baru dan merangsang peningkatan kegiatan ekonomi.

Pembangunan ekonomi daerah adalah suatu proses, yaitu mencakup pembentukan institusi-institusi baru, pembangunan industri-industri alternatif, perbaikan kapasitas tenaga kerja untuk menghasilkan produk dan jasa yang lebih baik, identifikasi pasar-pasar, dan pengembangan perusahaan-perusahaan baru.

Setiap upaya pembangunan ekonomi daerah mempunyai tujuan utama untuk meningkatkan jumlah dan jenis peluang kerja untuk masyarakat daerah, dan dalam upaya untuk mencapai tujuan tersebut, pemerintah daerah dan masyarakatnya harus secara bersarna-sama mengambil inisiatif pembangunan daerah. Oleh karena itu pemerintah daerah beserta partisipasi masyarakatnya dengan menggunakan sumberdaya-sumberdaya yang ada

harus mampu menaksir potensi sumberdaya-sumberdaya yang diperlukan untuk merancang dan membangun perekonomian daerah.

Diketahui bahwa, di Indonesia sebagian besar wilayahnya dimanfaatkan untuk sektor pertanian, sehingga Indonesia disebut sebagai negara agraris, yang artinya sebagian besar penduduknya berprofesi sebagai petani. Banyaknya jumlah penduduk Indonesia yang menggantungkan hidupnya pada sektor pertanian menunjukkan demikian besar peranan sektor pertanian dalam menopang perekonomian nasional dan memiliki implikasi penting dalam pembangunan ekonomi daerah dan negara ke depannya.

Potensi pertanian yang cukup besar ini memiliki peran yang strategis dalam pembangunan nasional untuk menopang pertumbuhan ekonomi, yaitu dapat dilihat antara lain sebagai penyedia pangan bagi 262 juta jiwa penduduk Indonesia (2017), penghasil pendapatan asli daerah (PAD) melalui kegiatan distribusi atau pemasaran hasil pertanian, penyedia bahan baku industri, peningkatan kesempatan kerja, peningkatan PDB (product domestic bruto), pengentasan kemiskinan, peningkatan pendapatan serta kesejahteraan masyarakat.

Tabel .1.

pertumbuhan produksi, luas panen dan produktivitas padi di Indonesia, 2013-2017

Komoditas	2013	2014	2015	2016	2017	Pertumbuhan
Padi (ton)	71.280	70.846	75.398	79.355	81.073	2,16
Luas panen (Ha)	13.835	13.797	14.117	15.156	15.697	3,57
Produktivitas (ku/ha)	51.52	51.35	53.41	52.36	51.65	-1,36

Sumber : Badan Pusat Statistik

Pembangunan pertanian ke depan diharapkan dapat memberikan kontribusi yang lebih besar dalam rangka mengurangi kesenjangan dan memperluas kesempatan kerja, serta mampu memanfaatkan peluang ekonomi yang terjadi sebagai dampak dari globalisasi dan liberalisasi ekonomi dunia. Untuk itu, diperlukan sumberdaya manusia pertanian yang berkualitas dan handal, dengan memiliki ciri kemandirian, profesionalitas, berjiwa wirausaha (*entrepreneurship*), berdedikasi, etos kerja yang tinggi, disiplin dan moral yang luhur serta berwawasan global, sehingga petani dan pelaku usaha pertanian lainnya akan mampu membangun usaha tani yang berdaya guna dan berdaya saing.

Pengalaman dalam sejarah pertanian di Indonesia menunjukkan bahwa, sektor pertanian di Indonesia telah memberikan sumbangan yang sangat berarti, dalam pencapaian tujuan pembangunan nasional. Salah satu contoh melalui program BIMAS yang terintegrasi dan terkoordinasi secara ketat, telah menghantarkan Indonesia meraih swasembada beras tahun 1984. Namun setelah itu, terjadi penurunan peranan sektor pertanian secara perlahan-lahan. Pertanian tidak lagi menunjukkan karakter yang sesungguhnya sebagai salah satu kegiatan perekonomian yang prospektif, dan mempunyai kemampuan bisnis yang tinggi.

Keberhasilan pembangunan pertanian lebih banyak ditentukan oleh peranan petani itu sendiri dan dalam kenyataannya tidak terlepas dari bimbingan dan bantuan pemerintah. Keberhasilan pembangunan pertanian sangat menentukan peningkatan aktifitas ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Hal ini hanya dapat dicapai apabila pelaku utama dan pelaku usaha pertanian memiliki kemampuan teknis, manajerial, kewirausahaan,

dan organisasi bisnis yang handal sehingga pelaku pembangunan pertanian mampu membangun usaha dari hulu sampai dengan hilir yang berdaya saing tinggi dan mampu berperan serta dalam melestarikan lingkungan hidup sejalan dengan prinsip pembangunan berkelanjutan.

Banyak masalah pertanian yang seharusnya pemerintah selesaikan, karena pemerintah sebagai pembina dan pengayom harus mampu mendistribusikan manfaat sumber daya alam secara adil dan merata sesuai dengan salah satu tujuan luhur mendirikan Negara Indonesia yang tergambar di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, dan pemerintah berperan aktif dalam memajukan kesejahteraan petani. Namun, kenyataannya bahwa dengan adanya beberapa kebijakan pertanian yang dilaksanakan oleh pemerintah malah mencekik petani ditambah oleh semakin kurangnya lahan dan sarana prasarana yang cukup memadai.

Petani juga berperan penting dalam menstabilkan perekonomian nasional, misalnya saja melalui program ketahanan pangan maupun pertanian berbasis agribisnis.

Pembangunan yang begitu pesat di kawasan Asia Tenggara, termasuk Indonesia pada dekade yang lalu telah dapat menaikkan taraf hidup masyarakat di segala bidang. Akan tetapi pembangunan yang berlangsung cepat tersebut terkadang membawa dampak. Begitupun terhadap lingkungan wilayah pedesaan dengan berbagai pembangunan yang dilakukan telah menimbulkan kerusakan ataupun bencana ekologis di kawasan pedesaan.

Berkaitan dengan pembangunan daerah, khususnya perekonomian di sektor pertanian ini, Kabupaten Gowa sebagai salah satu daerah yang ada di Indonesia yang terletak di Sulawesi Selatan ini memiliki luas wilayah 1.883,32

km dan berpenduduk sebanyak 652.941 jiwa. Luas wilayah yang tidak besar namun terus mengembangkan usaha pertaniannya melalui campur tangan Pemerintah Daerah setempat.

Pemerintah daerah setempat telah melakukan upaya-upaya pembangunan pertanian termasuk industri sektor pertanian dengan melakukan perubahan-perubahan melalui diversifikasi dan intensifikasi pertanian serta penggalakan agribisnis. Indikator penting dari usaha Pemerintah dalam meningkatkan perekonomian daerah dapat dilihat dari pertumbuhan PDRB (*Product Domestic Regional Bruto*) serta keberhasilan dalam penerimaan dari Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Berdasar alasan tersebut maka dilakukan penelitian mengenai peranan Pemerintah Kabupaten Gowa dalam meningkatkan perekonomian sektor pertanian ini.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan, pemerintah berperan dan berkewajiban untuk memajukan masyarakat melalui pembangunan serta meningkatkan perekonomian khususnya di sektor pertanian, sehingga penelitian ini diarahkan pada perumusan masalah yaitu :
Bagaiman peranan pemerintah daerah dalam meningkatkan ekonomi subsektor pertanian tanaman pangan dan hortikultura di Kabupaten Gowa?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah arah atau sasaran yang ingin di capai setelah kegiatan penelitian di laksanakan. Adapun tujuan pelaksanaan yang ingin di capai dalam penelitian adalah sebagai berikut : Untuk mengetahui peranan pemerintah daerah dalam pembangunan khususnya dalam

meningkatkan perekonomian subsektor pertanian tanaman pangan dan hortikultura di Kabupaten Gowa

D. Manfaat Penelitian

Setiap manfaat penelitian yang dilakukan sudah pasti diharapkan dapat memberikan manfaat atau kegunaan, baik bagi peneliti maupun pihak lain yang memerlukannya. Demikian pula halnya dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis, diharapkan memberikan manfaat antara lain:

a. Secara praktis

Manfaat secara praktis dapat memberikan sumbangan bagi pengembangan konsep-konsep atau teori-teori mengenai pembangunan dan regional khususnya yang berhubungan peranan pemerintah daerah dalam meningkatkan perekonomian di subsektor pertanian.

b. Secara teoritis

1. Agar diperoleh gambaran tentang peranan dan tindak lanjut Pemerintah Daerah dalam meningkatkan perekonomian di subsektor pertanian di Kabupaten Gowa.
2. Pengembangan wawasan pengetahuan khususnya perekonomian subsektor pertanian

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Peranan Pemerintah

Pemerintah bertugas mengatur sebanyak mungkin segi kehidupan masyarakat, karena hanya dengan cara itu keteraturan, ketertiban, keamanan, dan kemajuan akan dapat dipelihara dan dicapai. Jadi, pemerintahan tetap merupakan kebutuhan. Pemerintah adalah organ yang dianggap mampu menjalankan proses tersebut secara bertanggung jawab. Ini menunjukkan bahwa pemerintah perlu mengambil prakarsa lebih dulu dalam bentuk pembangunan untuk masyarakat tetapi tidak mematikan inisiatif masyarakat yang sudah tumbuh dan berkembang. Pemerintahan tidaklah diadakan untuk melayani dirinya sendiri, tetapi untuk melayani masyarakat, menciptakan kondisi yang memungkinkan setiap anggota masyarakat mengembangkan kemampuan dan kreativitasnya demi mencapai kemajuan bersama.

Pembangunan menekankan pada proses perubahan masyarakat yang menyangkut aspek sosial maupun psikologi, dalam rangka membentuk sikap masyarakat untuk mampu mengembangkan, memelihara dan menanamkan sumber-sumber yang mereka miliki dalam memperbaiki taraf hidupnya. Pendekatan yang dilakukan pemerintah untuk membentuk sikap masyarakat dalam pembangunan adalah melalui peranan pemerintah dengan cara membimbing, membina, mendorong masyarakat untuk berperan sebagai subjek pembangunan (bukan objek pembangunan). Dalam hubungan ini,

maka kebijakan pemerintah dalam usaha mencapai tujuan tersebut adalah dengan memberikan pelayanan yang luas kepada masyarakat.

Menurut Ndraha (1997 : 730), pemerintah adalah semua badan yang memproduksi, mendistribusi atau menjual alat pemenuhan kebutuhan rakyat berbentuk jasa publik dan layanan sipil, yaitu menangani kebutuhan masyarakat tersebut yang berlangsung pada tiga level, yaitu policy, manajemen dan teknis operasional.

Pendapat Katz (dalam Supriatna, 2000 : 26), peranan pemerintah di negara berkembang memegang peranan sentral dalam pembangunan; kemampuan pemerintah sangat diperlukan dalam menggerakkan sikap dan potensi masyarakat.

Salah satu tugas penting Pemerintah adalah melaksanakan pembangunan di bidang ekonomi. Pemerintah tidak hanya berperan sebagai salah satu pelaku ekonomi, akan tetapi pemerintah juga berperan dalam merencanakan, membimbing, dan mengarahkan terhadap jalannya roda perekonomian demi tercapainya tujuan pembangunan serta misalnya peningkatan hasil produktifitas hasil pertanian serta memberikan sumbangsih terhadap pendapatan ekonomi daerah.

Jadi dapat dikatakan bahwa Pemerintah termasuk Pemerintah Daerah memiliki peran sebagai koordinator, fasilitator dan stimulator. Disamping itu, pemerintah juga meningkatkan efisiensi dan pemerataan atau keadilan merupakan kewajiban pemerintah, selain itu pemerintah berkewajiban menjalankan fungsi-fungsi makro ekonomi dan meningkatkan pertumbuhan serta stabilitas ekonomi secara keseluruhan. Sejak kelahirannya, kapitalisme

berulang kali mengalami ujian berupa hantaman inflasi (lonjakan harga-harga) secara periodik serta pukulan depresi (lonjakan tingkat pengangguran).

1. Sejarah tentang diberlakukannya Subsidi Pupuk dan Nilai APBN untuk Subsidi Pupuk.

Pertambahan penduduk Indonesia yang pesat semenjak kemerdekaan berakibat meningkatnya kebutuhan pangan (terutama beras). Pada mulanya Indonesia sangat tergantung pada beras impor karena produksi dalam negeri tidak mampu mencukupi kebutuhan yang sangat besar. Tetapi dengan berjalannya waktu, mengingat ketahanan pangan merupakan komponen penting dari ketahanan nasional dan melihat potensi sumberdaya pertanian Indonesia yang sangat besar namun belum digarap secara maksimal, pemerintah berketetapan untuk mengurangi sedikit demi sedikit ketergantungan akan beras impor ini dengan harapan suatu saat akan tercapai swasembada pangan. (Hafsah, M.J. dan T. Sudaryanto, 2004)

Program peningkatan produksi padi dilaksanakan dengan cara ekstensifikasi dan intensifikasi produksi. Dalam rangka memacu produksi inilah peranan pupuk sangat krusial. Kebutuhan pupuk awalnya pun masih harus dipenuhi dari impor, tetapi karena mengingat gas alam sebagai bahan baku utama pembuatan pupuk tersedia cukup berlimpah di Indonesia, pemerintah memutuskan membangun sendiri pabrik pupuk. Sejarah perpupukan nasional dimulai dengan berdirinya Pupuk Sriwijaya (Pusri) yang dibangun dengan dana rampasan perang Jepang dan mulai berproduksi pada tahun 1963, diikuti oleh Petrokimia Gresik pada 1972, Pupuk Kujang pada 1978, Asean Aceh Fertilizer (AAF, proyek patungan antara negara-

negara ASEAN) pada 1983, serta Pupuk Kaltim (PKT) dan Pupuk Iskandar Muda pada 1984.(Hermanto. 1992).

Pemerintah berpendapat bahwa mengingat arti strategisnya komoditas pupuk, harga pupuk tidak dapat diserahkan begitu saja pada mekanisme pasar, karena fluktuasi harga akan mengakibatkan perubahan daya beli petani, konsentrasi pemupukan, dan pada akhirnya volume dan kualitas panen. Apalagi kenaikan harga pupuk tidak dengan sendirinya diikuti kenaikan harga gabah. Di satu sisi harga pupuk harus dipertahankan cukup rendah agar terjangkau oleh petani, di lain pihak keekonomian produksi pupuk juga harus dijaga agar industri pupuk tidak mengalami kerugian.

Terlepas dari segala kekurangannya, pemerintah Orde Baru memiliki komitmen tinggi membangun sistem agribisnis padi sehingga swasembada beras dapat diraih pada tahun 1984. Keterkaitan tersebut dapat dipandang sebagai prestasi luar biasa karena beranjak dari kondisi sistem agribisnis yang sangat parah dan volume impor terbesar di dunia, serta dalam kondisi permintaan beras domestik meningkat pesat dengan konsekuensi tingginya iaju pertumbuhan penduduk dan tingkat pendapatan per kapita.

Kebijakan subsidi pupuk dibuat Menteri Pertanian periode 2000 – 2004. Kenapa subsidi pupuk itu diberikan? Alasannya, saat itu kita mengalami krisis ekonomi dan moneter, serta krisis pangan. Saat itu kita mengimpor beras sekitar 5 juta ton dan ingin impor berkurang bahkan swasembada. Satu-satunya jalan agar jangan impor beras berarti produksi dalam negeri harus meningkat. Jika produksi dalam negeri ingin ditingkatkan, maka petani harus

bergairah dalam memproduksi. Petani akan bergairah jika mendapatkan keuntungan.

Di sisi lain, pada saat itu kita menandatangani Letter of Intent (LoI) dengan IMF yang salah satu poinnya adalah menghilangkan semua hambatan impor. Selain itu, di pasar dunia terjadi excess supply pangan yang mengakibatkan harga pangan dunia rendah sekali sehingga mengimpor sangat menguntungkan apalagi hambatannya dihilangkan.

Pilar keberhasilan tersebut ialah adanya terobosan teknologi dan paket kebijakan komprehensif (Simatupang dan Rusastra, 2004). Pilar pertama adalah momentum perkembangan teknologi Revolusi Hijau yang berada pada fase percepatan pada tahun 1970-an. Pilar kedua ialah paket mega-kebijakan yang mencakup semua elemen penopang agribisnis yaitu "Lima I": sistem inovasi, infrastruktur, investasi, insentif, dan institusi. Namun sejak akhir tahun 1980-an kedua pilar ini mengalami pengurangan. Teknologi revolusi hijau telah menunjukkan gejala stagnasi, sementara paket kebijakan perberasan mengalami dekonstruksi. Usahatani padi telah menunjukkan gejala sindrom overintensifikasi yang menyebabkan perlambatan pertumbuhan hasil dan total faktor produksi.

Ekstensifikasi sawah makin sulit dilakukan dan bahkan di Jawa luas sawah baku cenderung menurun. Akibatnya, laju produksi beras menurun dan makin tidak stabil. Hal inilah yang menyebabkan swasembada beras tidak dapat dipertahankan. Sejak awal tahun 1990-an Indonesia kembali menjadi importer beras terbesar di dunia.

Revitalisasi sistem agribisnis merupakan program mendesak guna menstabilkan pertumbuhan produksi beras yang sangat strategis dalam pemantapan swasembada pangan, peningkatan pendapatan petani, dan dinamisasi ekonomi desa. Untuk itu kebijakan pangan nasional perlu direkonstruksi secara komprehensif. Pemerintah perlu memikirkan paket kebijakan pengembangan produksi pangan utama secara komprehensif, dan tidak hanya terbatas pada harga dasar gabah saja.

2. Kebijakan subsidi pupuk

Dinamika kebijakan subsidi pupuk dapat dibedakan menjadi empat tahapan yaitu:

1. kebijakan subsidi sebelum era pasar bebas
2. kebijakan penghapusan subsidi memasuki pasar bebas
3. kebijakan pemberian kembali subsidi pupuk, dan
4. kebijakan subsidi pupuk era pasar bebas.

Dinamika kebijakan dengan tingkat intensitas yang relatif tinggi mengindikasikan ketidakpuasan berbagai pihak terkait terhadap rumusan kebijakan, implementasi, dan dampaknya bagi petani dan pembangunan pertanian. Bahasan ini akan membahas secara ringkas kinerja kebijakan tersebut dan mengajukan pola introduksi distribusi pupuk ke depan (Sudaryanto, et.al., 2005).

Bahasan ini akan difokuskan pada kinerja kebijakan subsidi pupuk era pasar bebas yang dipicu oleh adanya peningkatan harga gas sejak tahun 2000 yang akhirnya mendorong pemerintah memberikan kembali subsidi

pupuk sejak tahun 2001. Secara ringkas kinerja subsidi pupuk pada periode sebelumnya dapat dinyatakan (Sudaryanto, et.al., 2005) sebagai berikut:

- a. Kinerja subsidi sebelum era pasar bebas: mampu mendorong tercapainya swasembada beras 1984; pengurangan subsidi perlu dikompensasi dengan peningkatan harga produksi; dan peningkatan harga pupuk tidak berpengaruh terhadap penggunaannya, karena proporsinya dalam biaya usahatani masih relatif kecil;
- b. Penghapusan subsidi memasuki era pasar bebas: penghapusan monopoli telah mengefisienkan distribusi pupuk; subsidi pupuk dinilai lebih adil dibandingkan dengan subsidi gas untuk pabrik pupuk;
- c. Kebijakan pemberian kembali subsidi pupuk: format ROSP (Rencana Operasional Subsidi Pupuk) memungkinkan pabrik pupuk memperoleh subsidi langsung dari pemerintah; subsidi untuk pabrik pupuk, dan bukan untuk petani.

struktur subsidi hanya menguntungkan pabrik pupuk.

Hasil kajian PSE KP terhadap kinerja subsidi pupuk pada era pasar bebas diperoleh beberapa informasi penting (Sudaryanto, et.al., 2005) sebagai berikut:

- a. Konstruksi kebijakan menimbulkan dualisme pasar dan rawan terhadap penyimpangan;
- b. Terjadinya ekspor ilegal karena harga di pasar dunia lebih menarik;
- c. Pengalihan atau pencabutan subsidi pupuk dapat menimbulkan lonjakan harga pupuk domestik;

- d. Peluang terjadinya kelangkaan pasokan cukup besar sebagai akibat dari kesalahan manajemen;
- e. Subsidi input lebih mudah dibandingkan subsidi harga output pertanian;
- f. Kebijakan subsidi pupuk dinilai tidak efektif, dan disarankan agar subsidi pupuk dikembalikan lagi kepada petani.

Terdapat beberapa justifikasi kenapa subsidi pupuk lebih mudah dibandingkan dengan subsidi harga output pertanian, yaitu:

- a. Sebagian besar petani menghadapi kendala biaya produksi dengan orientasi minimisasi biaya, sehingga insentif input lebih sesuai;
- b. Insentif input lebih mudah mengakselerasi adopsi teknologi guna meningkatkan produktivitas dibanding insentif output;
- c. Apabila pengelolaan subsidi menggunakan prinsip bergaransi dan profesionalisme, maka penjaminan harga lebih mudah dicapai pada input dibandingkan output.

Pasokan pupuk (terutama Urea) diproduksi di dalam negeri dan harga domestik (subsidi) lebih rendah dari harga internasional. Sementara itu pasokan beras masih membutuhkan dukungan impor, yang harganya jauh lebih rendah dibandingkan harga yang didukung pemerintah (HPP). Dengan keterbatasan kemampuan menangani penyelundupan, maka membatasi rembesan (ke luar) pupuk akan lebih mudah dibandingkan rembesan (ke dalam) beras.

Fakta di lapangan menunjukkan bahwa kebijakan subsidi pupuk pada era pasar bebas ini dinilai tidak efektif untuk membantu petani. Hal ini dibuktikan oleh beberapa fakta berikut ini:

- a. Harga pupuk di tingkat petani jauh di atas harga HET; dan
- b. Pasokan pupuk di tingkat petani seringkali langka karena konsekuensi dari dualisme pasar, ekspor pupuk, dan keterbatasan penyaluran oleh pabrik pupuk.

Fenomena langka pasok dan lonjak harga pupuk merupakan kasus menyimpang yang tidak semestinya terjadi. Produksi pupuk urea dalam negeri jauh melebihi kebutuhan dan distribusinya dikendalikan pemerintah. Berdasarkan fenomena di atas PSE-KP secara tegas menyarankan "kembalikan subsidi pupuk kepada petani" (Simatupang, 2004).

3. Mekanisme Implementasi Kebijakan Harga Dasar dan Harga Tertinggi serta Kendala yang dihadapi Pemerintah

Beban subsidi ini timbul sebagai konsekuensi dari adanya kebijakan pemerintah dalam rangka penyediaan pupuk bagi petani dengan harga jual pupuk yang lebih rendah dari harga pasar.

Tujuan utama subsidi pupuk adalah agar harga pupuk di tingkat petani dapat tetap terjangkau oleh petani, sehingga dapat mendukung peningkatan produktivitas petani dan mendukung program ketahanan pangan.

Beban subsidi pupuk dipengaruhi oleh:

- a. biaya pengadaan pupuk yang bersubsidi yang merupakan selisih antara harga eceran tertinggi (HET) dengan harga pasar (Rp/kg), dan
- b. cakupan volume (ribu ton) pupuk yang memperoleh subsidi. Khusus untuk urea, HET dipengaruhi oleh masukan bagi produsen pupuk berupa pasokan gas.

Karena harga gas diperhitungkan dalam dolar (US\$/MMBTU), besaran subsidi urea juga dipengaruhi oleh kurs dolar. Selain HET, harga gas, dan kurs, subsidi pupuk juga dipengaruhi oleh biaya transportasi ke daerah terpencil dan biaya pengawasan. Atau secara matematisnya, Subsidi Pupuk = $(\text{HET} - \text{Harga Pasar}) \times \text{Volume} + \text{Transportasi} + \text{Pengawasan}$. Besar beban subsidi dapat dinaikkan atau diturunkan dengan cara melakukan penyesuaian terhadap faktor-faktor tersebut di atas. Misalkan, untuk mengurangi beban subsidi pupuk dapat dilakukan dengan cara menaikkan HET, akan tetapi karena daya beli petani yang masih rendah kenaikan HET yang terlalu tinggi akan memberatkan petani.

Penyaluran subsidi pupuk melalui beberapa BUMN produsen pupuk. Ada lima BUMN produsen pupuk yang menerima subsidi pupuk urea (PT Pupuk Sriwijaya, PT Pupuk Kalimantan Timur, PT Pupuk Petrokimia Gresik, PT Pupuk Kujang, dan PT Pupuk Iskandar Muda) dan satu BUMN produsen pupuk yang mendapat subsidi pupuk non-urea yaitu PT Pupuk Petrokimia Gresik. Pola pemberian subsidi pada tahun 2006 direncanakan dilakukan melalui pemberian subsidi atas harga gas sebagai bahan baku produksi pupuk, dan diberikan untuk jenis pupuk urea, ZA, SP-36, dan NPK yang diproduksi BUMN produsen pupuk bersubsidi. Perubahan pola dari subsidi gas ke subsidi harga diharapkan akan dapat mencegah kenaikan HET pupuk serta mengatasi persoalan pasokan gas yang sering dialami oleh industri pupuk.

Grafik 10 menyajikan perkembangan subsidi pupuk selama periode 2003-2006 yang menunjukkan bahwa selama tiga tahun terakhir subsidi pupuk mengalami peningkatan. Beban subsidi pupuk 2006 lebih tinggi

daripada rata-rata selama tiga tahun (2003-2005) yang sebesar 0,06 persen terhadap PDB.

4. Kendala Pemerintah

Salah satu faktor yang membuat rumitnya menyampaikan subsidi pupuk langsung sampai ke petani adalah tingkat pendidikan petani sangat rendah. Pola dan cara menyampaikan subsidi pupuk langsung ke petani bermacam-macam, ada yang memakai chip, kartu, membeli pupuk menggunakan ATM kemudian diperhitungkan subsidinya langsung masuk rekening petani, memberikan uang tunai melalui kelompok tani, dan lain lain. Berbagai mekanisme tersebut sulit dan belum mampu dipahami para petani. Walaupun sudah dilakukan studi banding ke beberapa negara, namun karena perbedaan tingkat pendidikan petani, akibatnya mekanisme pemberian subsidi pupuk langsung kepada petani tetap sulit diterapkan kepada petani di Indonesia. Misalnya uji coba memberikan subsidi pupuk langsung kepada petani di Kabupaten Karawang berhasil, namun sebelum diberlakukan secara nasional masih perlu dilakukan uji coba lagi di masing-masing provinsi penghasil beras di Jawa dan luar Jawa. Hal itu dimaksudkan agar petani benar-benar memahami mekanisme penyaluran subsidi pupuk langsung ke petani. Karena uji coba di Kabupaten Karawang tidak berhasil, KTNA mengharapkan pemberian subsidi pupuk kepada petani dikembalikan ke sistem lama, sambil menunggu ditemukan cara yang efektif dan tepat sasaran dalam menyampaikan subsidi pupuk langsung kepada petani.

Kebutuhan pupuk ke sektor pertanian tanaman pangan hanya 10% dari biaya produksi. Sehingga petani umumnya tidak tahu bahwa harga pupuk yang dibeli mengandung subsidi. Supaya petani tahu ada pupuk subsidi dan

non-subsidi, hendaknya kios resmi penjual pupuk bersubsidi harus dibedakan dengan kios penjual pupuk non-subsidi. Kios-kios penjual pupuk di kawasan pertanian tanaman pangan seharusnya semuanya adalah kios yang menjual pupuk bersubsidi. Sedangkan pupuk non-subsidi harus dijual pada kios-kios di daerah perkebunan. (Simatupang, P. dan I W. Rusastra. 2004).

Kendala lain yang dihadapi dalam memberikan subsidi pupuk langsung kepada petani terletak pada masalah kurangnya sosialisasi kepada petani. Kios-kios milik distributor dan pengecer resmi yang menyalurkan pupuk bersubsidi dari pabrik pupuk tertentu harus diberi warna cat berbeda dengan kios-kios milik distributor dan pengecer resmi pupuk bersubsidi dari pabrik pupuk yang lain. Bisa dicontoh tempat pengisian BBM milik Pertamina warna catnya berbeda dengan pengisian BBM milik swasta asing. Seharusnya kios-kios milik distributor dan pengecer resmi pupuk bersubsidi yang menyalurkan produksi pabrik pupuk tertentu juga menggunakan warna/cat berbeda dibanding kios-kios milik distribute dan pengecer resmi pabrik pupuk yang lain. Dengan demikian masyarakat dan petani mudah mengontrol apabila kios-kios pengecer resmi tersebut menjual pupuk bersubsidi di atas HET (Harga Eceran Tertinggi).

Dari sisi pabrik pupuk, mekanisme pemberian subsidi pupuk langsung ke petani lebih bagus, karena pabrik pupuk tidak repot-repot mengurus mencairkan subsidi pupuk ke pemerintah. Sering pabrik pupuk menghadapi kendala keterlambatan pencairan subsidi pupuk dalam waktu cukup lama, sehingga mengganggu cash-flow perusahaan. (Waluyo dan A. Djauhari. 1992).

5. Budidaya tanaman padi

Padi merupakan komoditas tanaman yang sudah sejak berabad-abad telah dibudidayakan oleh kalangan petani terutama di Indonesia sendiri. Tanaman yang mempunyai nilai ekonomi yang tinggi ini akan selamanya dibutuhkan karena padi merupakan tanaman penghasil beras guna untuk kebutuhan konsumsi makanan dan kebutuhan nutrisi bagi semua umat manusia. Untuk itu budidaya padi juga membutuhkan panduan yang lengkap untuk mendapatkan hasil produksi yang maksimal. Berikut adalah langkah-langkah dalam budidaya padi yang baik dan benar.

A. Syarat Tumbuh

1. Iklim

- a. Tumbuh di daerah tropis/subtropis pada 45 derajat LU sampai 45 derajat LS dengan cuaca panas dan kelembaban tinggi dengan musim hujan 4 bulan.
- b. Rata-rata curah hujan yang baik adalah 200 mm/bulan atau 1500-2000 mm/tahun. Padi dapat ditanam di musim kemarau atau hujan. Pada musim kemarau produksi meningkat asalkan air irigasi selalu tersedia. Di musim hujan, walaupun air melimpah produksi dapat menurun karena penyerbukan kurang intensif.
- c. Di dataran rendah padi memerlukan ketinggian 0-650 m dpl dengan temperatur 22-27 derajat C sedangkan di dataran tinggi 650-1.500 m dpl dengan temperatur 19-23 derajat C.
- d. Tanaman padi memerlukan penyinaran matahari penuh tanpa naungan.
- e. Angin berpengaruh pada penyerbukan dan pembuahan tetapi jika terlalu kencang akan merobohkan tanaman.

2. Memilih Tempat Pesemaian

- a. Tempat untuk membuat pesemaian merupakan syarat yang harus diperhatikan agar diperoleh bibit yang baik.
- b. Tanahnya harus yang subur, banyak mengandung humus, dan gembur.
- c. Tanah itu harus tanah yang terbuka, tidak terlindung oleh pepohonan, sehingga sinar matahari dapat diterima dan dipergunakan sepenuhnya.
- d. Dekat dengan sumber air terutama untuk pesemaian basah, sebab pesemaian banyak membutuhkan air. Sedangkan pesemaian kering dimaksudkan mudah mendapatkan air untuk menyirami apabila pesemaian itu mengalami kekeringan.

Apabila areal yang akan ditanami cukup luas sebaiknya tempat pembuatan pesemaian tidak berkumpul menjadi satu tempat tetapi dibuat memencar. Hal itu untuk menghemat biaya atau tenaga pengangkutannya.

3. Mengerjakan Tanah Untuk Pesemaian

Tanah pesemaian harus mulai dikerjakan kurang lebih 50 hari sebelum penanaman. Karena adanya dua jenis padi, yaitu padi basah dan padi kering, maka tanah pesemaian juga dapat dibedakan atas pesemaian basah dan pesemaian kering.

- a. Pesemaian Basah.

Dalam membuat tanah sawah basah pesemaian seharusnya benar-benar subur. Rumput dan jerami yang masih harus dibersihkan terlebih dahulu. Kemudian sawah dibanjiri, tujuannya adalah agar tanah menjadi lembut, rumput akan tumbuh menjadi mati, dan berbagai serangga yang dapat merusak bibit mati pula. Selain itu, jika tanah cukup lembut dan dibajak berkali-kali hingga halus. Pada saat itu juga juga membuat dan

memperbaiki tanggul dan pematang sawah. Sebagai tindakan dasar persemaian luas harus dibuat sekitar $1/20$ dari areal padi yang akan ditanam. Jadi, ketika padi yang akan ditanam daerah 1 ha, area pembibitan yang harus dilakukan adalah $1/20 \times 10\,000\text{ m}^2 = 500\text{ m}^2$. Benih yang dibutuhkan adalah sekitar 75 gram biji per 1 m^2 , atau sebanyak kurang lebih 40 kg.

b. Pesemaian Kering

Prinsip pembuatan pesemaian kering sama dengan pesemaian basah. Rumput-rumput dan sisa-sisa jerami yang ada harus dibersihkan terlebih dahulu. Tanah dibolak-balik dengan bajak dan digaru, atau bisa dan halus. juga memakai cangkul yang terpenting tanah menjadi gembur. Setelah tanah menjadi halus, diratakan dan dibuat bedengan-bedengan. Adapun ukuran bedengan sebagai berikut : Tinggi 20 cm, lebar 120 cm, panjang 500-600 cm. Antara bedengan yang satu dengan yang lain diberi jarak 30 cm sebagai selokan yang dapat digunakan untuk memudahkan : Penaburan biji, pengairan, pemupukan, penyemprotan hama, penyiangan, dan pencabutan bibit.

c. Penaburan Biji

Untuk memilih biji-biji yang bertunas dan tidak, biji harus direndam dalam air.

Biji-biji yang bertunas akan tenggelam sedangkan yang biji-biji yang hampa akan terapung. Dan biji-biji yang terapung bisa dibuang. Maksud perendaman selain memilih biji yang bertunas, biji juga agar cepat berkecambah. Lama perendaman cukup 24 jam, kemudian biji diambil dari rendaman lalu di peram dibungkus memakai daun pisang dan

karung. Pemeraman dibiarkan selama 8 jam. Apabila biji sudah berkecambah dengan panjang 1 mm, maka biji disebar ditempat pesemaian. Diusahakan agar penyebaran biji merata, tidak terlalu rapat dan tidak terlalu jarang. Apabila penyebarannya terlalu rapat akan mengakibatkan benih yang tumbuh kecil-kecil dan lemah, tetapi penyebaran yang terlalu jarang biasanya menyebabkan tumbuh benih tidak merata.

4. Pemeliharaan Pesemaian

a. Pengairan

Pada pesemaian basah, begitu biji ditaburkan terus digenangi air selama 24 jam, baru dikeringkan. Genangan air dimaksudkan agar biji yang disebar tidak berkelompok-kelompok sehingga dapat merata. Adapun pengeringan setelah penggenangan selama 24 jam itu dimaksudkan agar biji tidak membusuk dan mempercepat pertumbuhan. Pada pesemaian kering, pengairan dilakukan dengan air rembesan. Air dimasukan dalam selokan antara bedengan-bedengan, sehingga bedengan akan terus-menerus mendapatkan air dan benih akan tumbuh tanpa mengalami kekeringan. Apabila benih sudah cukup besar, penggenangan dilakukan dengan melihat keadaan. Pada bedengan pesemaian bila banyak ditumbuhi rumput, perlu digenangi air. Apabila pada pesemaian tidak ditumbuhi rumput, maka penggenangan air hanya kalau memerlukan saja.

5. Pengobatan

Untuk menjaga kemungkinan serangan penyakit, pesemaian perlu disemprot dengan Insektisida 2 kali, yaitu 10 hari setelah penaburan dan sesudah pesemaian berumur 17 hari.

B. Cara Mengolah Tanah

Pengolahan tanah untuk penanaman padi harus sudah disiapkan sejak dua bulan penanaman. Pelaksanaannya dapat dilakukan dengan dua macam cara yaitu dengan cara tradisional dan cara modern.

- a. Pengolahan tanah sawah dengan cara tradisional, yaitu pengolahan tanah sawah dengan alat-alat sederhana seperti sabit, cangkul, bajak dan garu yang semuanya dilakukan oleh manusia atau dibantu oleh binatang misalnya, kerbau dan sapi.
- b. Pengolahan tanah sawah dengan cara modern yaitu pengolahan tanah sawah yang dilakukan dengan mesin. Dengan traktor dan alat-alat pengolahan tanah yang serba dapat kerja sendiri.

1. Pembersihan

Sebelum tanah sawah dicangkul harus dibersihkan lebih dahulu dari jerami-jerami atau rumput-rumput yang ada. Dikumpulkan di satu tempat atau dijadikan kompos. Sebaiknya jangan dibakar, sebab pembakaran jerami itu akan menghilangkan zat nitrogen yang sangat penting bagi pertumbuhan tanaman.

2. Pencangkulan

Sawah yang akan dicangkul harus digenangi air terlebih dahulu agar tanah menjadi lunak dan rumput-rumputnya cepat membusuk. Pekerjaan

pencangkulan ini dilanjutkan pula dengan perbaikan pematang-pematang yang bocor.

3. Pembajakan

Sebelum pembajakan, sawah-sawah harus digenangi air lebih dahulu. Pembajakan dimulai dari tepi atau dari tengah petakan sawah yang dalamnya antara 12-20 cm. tujuan pembajakan adalah mematikan dan membenamkan rumput, dan membenamkan bahan-bahan organis seperti : pupuk hijau, pupuk kandang, dan kompos sehingga bercampur dengan tanah. Selesai pembajakan sawah digenangi air lagi selama 5-7 hari untuk mempercepat pembusukan sisa-sisa tanaman dan melunakan bongkahan-bongkahan tanah.

4. Penggaruan

Pada waktu sawah akan digaru genangan air dikurangi. Sehingga cukup hanya untuk membasahi bongkahan-bongkahan tanah saja. Penggaruan dilakukan berulang-ulang sehingga sisa-sisa rumput terbenam dan mengurangi perembesan air ke bawah. Setelah penggaruan pertama selesai, sawah digenangi air lagi selama 7-10 hari, selang beberapa hari diadakan pembajakan yang kedua. Tujuannya yaitu: meratakan tanah, meratakan pupuk dasar yang dibenamkan, dan pelumpuran agar menjadi lebih sempurna.

C. Teknik Penanaman Padi

1. Pemilihan Bibit

Pekerjaan penanaman didahului dengan pekerjaan pencabutan bibit di pesemaian. Bibit yang akan dicabut adalah bibit yang sudah berumur 25-40

hari (tergantung jenisnya), berdaun 5-7 helai. Sebelum pesemaian 2 atau 3 hari tanah digenangi air agar tanah menjadi lunak dan memudahkan pencabutan. Caranya, 5 sampai 10 batang bibit kita pegang menjadi satu kemudian ditarik ke arah badan kita, usahakan batangnya jangan sampai putus. Ciri-ciri bibit yang baik antara lain :

- 1) Umurnya tidak lebih dari 40 hari
- 2) Tingginya kurang lebih dari 40 hari
- 3) Tingginya kurang lebih 25 cm
- 4) Berdaun 5-7 helai
- 5) Batangnya besar dan kuat
- 6) Bebas dari hama dan penyakit

Bibit yang telah dicabut lalu diikat dalam satu ikatan besar untuk memudahkan pengangkutan. Bibit yang sudah dicabut harus segera ditanam, jangan sampai bermalam.

Penanaman padi yang baik harus menggunakan larikan ke kanan dan ke kiri dengan jarak 20 x 20 cm, hal ini untuk memudahkan pemeliharaan, baik penyiangan atau pemupukan dan memungkinkan setiap tanaman memperoleh sinar matahari yang cukup dan zat-zat makanan secara merata.

Dengan berjalan mundur tangan kiri memegang bibit, tangan kanan menanam, tiap lubang 2 atau 3 batang bibit, dalamnya kira-kira 3 atau 4 cm. usahakan penanaman tegak lurus jangan sampai miring. Usahakan penanaman bibit tidak terlalu dalam ataupun terlalu dangkal. Bibit yang ditanam terlalu dalam akan menghambat pertumbuhan akar dan anakannya sedikit. Bibit yang ditanam terlalu dangkal akan menyebabkan mudah rubuh atau hanyut oleh aliran air. Dengan demikian jelas bahwa penanaman bibit

yang terlalu dalam maupun terlalu dangkal akan berpengaruh pada hasil produksi.

D. Pemeliharaan Tanaman Padi

1. Pengairan

Air merupakan syarat mutlak bagi pertumbuhan tanaman padi sawah. Masalah pengairan bagi tanaman padi sawah merupakan salah satu factor penting yang harus mendapat perhatian penuh demi mendapat hasil panen yang akan datang.

Air yang dipergunakan untuk pengairan padi di sawah adalah air yang berasal dari sungai, sebab air sungai banyak mengandung lumpur dan kotoran-kotoran yang sangat berguna untuk menambah kesuburan tanah dan tanaman. Air yang berasal dari mata air kurang baik untuk pengairan sawah, sebab air itu jernih, tidak mengandung lumpur dan kotoran.

2. Memasukan air kedalam sawah dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- a. Air yang dimasukkan ke petakan-petakan sawah adalah air yang berasal dari saluran sekunder. Air dimasukkan ke petakan sawah melalui saluran pemasukan, dengan menghentikan lebih dahulu air pada saluran sekunder.
- b. Untuk menjaga agar genangan air didalam petakan sawah itu tetap, jangan lupa dibuat pula lubang pembuangan. Lubang pemasukan dan lubang pembuangan tidak boleh dibuat lurus.
- c. Hal ini dimaksudkan agar ada pengendapan lumpur dan kotoran-kotoran yang sangat berguna bagi pertumbuhan tanaman. Apabila lubang

pemasukan dan lubang pembuangan itu dibuat lurus, maka air akan terus mengalir tanpa adanya pengendapan.

Pada waktu mengairi tanaman padi di sawah, dalamnya air harus diperhatikan dan disesuaikan dengan umur tanaman tersebut. Kedalaman air hendaknya diatur dengan cara sebagai berikut :

- a. Tanaman yang berumur 0-8 hari dalamnya air cukup 5 cm.
- b. Tanaman yang berumur 8-45 hari dalamnya air dapat ditambah hingga 10-20 cm.
- c. Tanaman padi yang sudah membentuk bulir dan mulai menguning dalamnya air dapat ditambah hingga 25 cm. setelah itu dikurangi sedikit demi sedikit.
- d. Sepuluh hari sebelum panen sawah dikeringkan sama sekali. Agar padi dapat masak bersama-sama.

3. Penyiangan dan Penyulaman

Setelah penanaman, Apabila tanaman padi ada yang mati harus segera diganti (disulam). Tanaman sulam itu dapat menyamai yang lain, apabila penggantian bibit baru jangan sampai lewat 10 hari sesudah tanam.

Selain penyulaman yang perlu dilakukan adalah penyiangan agar rumput-rumput liar yang tumbuh di sekitar tanaman padi tidak bertumbuh banyak dan mengambil zat-zat makanan yang dibutuhkan tanaman padi. Penyiangan dilakukan dua kali yang pertama setelah padi berumur 3 minggu dan yang kedua setelah padi berumur 6 minggu.

E. Pemupukan

Pemupukan bertujuan untuk menambah zat-zat dan unsur-unsur makanan yang dibutuhkan oleh tanaman di dalam tanah. Untuk tanaman padi, pupuk yang digunakan antara lain:

- a. Pupuk alam, sebagai pupuk dasar yang diberikan 7-10 hari sebelum tanaman dapat digunakan pupuk-pupuk alam, misalnya: pupuk hijau, pupuk kandang, dan kompos. Banyaknya kira-kira 10 ton / ha.
- b. Pupuk buatan diberikan sesudah tanam, misalnya: ZA/Urea, DS/TS, dan ZK. Adapun manfaat pupuk tersebut sebagai berikut:
- c. ZA/Urea : menyuburkan tanah, mempercepat tumbuhnya anakan, mempercepat tumbuhnya tanaman, dan menambah besarnya gabah.
- d. DS/TS : mempercepat tumbuhnya tanaman, merangsang pembungaan dan pembentukan buah, mempercepat panen.
- e. ZK : memberikan ketahanan tanaman terhadap hama / penyakit, dan mempercepat pembuatan zat pati.

F. Pengendalian Hama Dan Penyakit

1. Hama di Persemaian Basah (untuk padi sawah)

Hama putih (*Nymphula depunctalis*)

Gejala : menyerang daun bibit, kerusakan berupa titik-titik yang memanjang sejajar tulang daun, ulat menggulung daun padi.

Pengendalian

- a. Pengaturan air yang baik, penggunaan bibit sehat, melepaskan musuh alami, menggugurkan tabung daun;
- b. Penyemprotan insektisida Kiltop 50 EC atau Tomafur 3G.

2. Padi trip (*Trips oryzae*).

Gejala : daun menggulung dan berwarna kuning sampai kemerahan, pertumbuhan bibit terhambat, pada tanaman dewasa gabah tidak berisi.

- a. Pengendalian : insektisida Mipein 50 WP atau Dharmacin 50 WP. Ulat tentara (*Pseudaletia unipuncta*, berwarna abu-abu; *Spodoptera litura*, berwarna coklat hitam; *S. exempta*, bergaris kuning)
- b. Gejala : ulat memakan helai daun, tanaman hanya tinggal tulang-tulang daun.
- c. Pengendalian: cara mekanis dan insektisida Sevin, Diazenon, Sumithion dan Agrocide.

3. Hama di Sawah

Wereng

Wereng penyerang batang padi : wereng padi coklat (*Nilaparvata lugens*), wereng padi berpunggung putih (*Sogatella furcifera*). Merusak dengan cara mengisap cairan batang padi. Saat ini hama wereng paling ditakuti oleh petani di Indonesia. Wereng ini dapat menularkan virus.

Gejala : tanaman padi menjadi kuning dan mengering, sekelompok tanaman seperti terbakar, tanaman yang tidak mengering menjadi kerdil.

Pengendalian

- a. Bertanam padi serempak, menggunakan varitas tahan wereng seperti IR 36, IR 48, IR 64, Cimanuk, Progo dsb, membersihkan lingkungan, melepas musuh alami seperti laba-laba, kepinding dan kumbang lebah.
- b. Penyempornan insektisida Applaud 10 WP, Applaud 400 FW atau Applaud 100

EC.

4. Walang sangit (*Leptocoriza acuta*)

Menyerang buah padi yang masak susu.

Gejala : dan menyebabkan buah hampa atau berkualitas rendah seperti berkerut, berwarna coklat dan tidak enak; pada daun terdapat bercak bekas isapan dan buah padi berbintik-bintik hitam.

Pengendalian

- a. Bertanam serempak, peningkatan kebersihan, mengumpulkan dan memunahkan telur, melepas musuh alami seperti jangkrik;
- b. Menyemprotkan insektisida Bassa 50 EC, Dharmabas 500 EC, Dharmacin 50 WP, Kiltop 50 EC.

5. epik hijau (*Nezara viridula*)

Menyerang batang dan buah padi.

Gejala : pada batang tanaman terdapat bekas tusukan, buah padi yang diserang memiliki noda bekas isapan dan pertumbuhan tanaman terganggu.

Pengendalian :

mengumpulkan dan memusnahkan telur/telurnya, penyemprotan insektisida Curacron 250 ULV, Dimilin 25 WP, Larvin 75 WP.

6. Hama tikus (*Rattus argentiventer*)

Tanaman padi akan mengalami kerusakan parah apabila terserang oleh hama tikus dan menyebabkan penurunan produksi padi yang cukup besar. Menyerang batang muda (1-2 bulan) dan buah.

Gejala : adanya tanaman padi yang roboh pada petak sawah dan pada serangan hebat ditengah petak tidak ada tanaman.

Pengendalian:

pergiliran tanaman, sanitasi, gropyokan, melepas musuh alami seperti ular dan burung hantu, penggunaan pestisida dengan tepat, intensif dan teratur, memberikan umpan beracun seperti seng fosfat yang dicampur dengan jagung atau beras.

7. Burung

Burung (manyar *Palceus manyar*, gelatik *Padda arzyvora*, pipit *Lonchura lencogastroides*, peking *L. puntulata*, bondol hitam *L. ferruginosa* dan bondol putih *L. ferramaya*).

Pengendalian Penyakit

- a. Menyerang padi menjelang panen, tangkai buah patah, biji berserakan.
- b. Pengendalian: mengusir dengan bunyi-bunyian atau orang-orangan.

8. Bercak daun coklat

Penyebab: jamur (*Helminthosporium oryzae*).

Gejala: menyerang pelepah, malai, buah yang baru tumbuh dan bibit yang baru berkecambah. Biji berbercak-bercak coklat tetapi tetap berisi, padi dewasa busuk kering, biji kecambah busuk dan kecambah mati.

Pengendalian:

- a. Merendam benih di dalam air panas, pemupukan berimbang, menanam padi tahan penyakit ini, menaburkan serbuk air raksa dan bubuk kapur (2:15);
- b. Dengan insektisida Rabcide 50 WP.

9. Blast

Penyebab: jamur *Pyricularia oryzae*.

Gejala: menyerang daun, buku pada malai dan ujung tangkai malai. Serangan menyebabkan daun, gelang buku, tangkai malai dan cabang di dekat pangkal malai membusuk. Proses pemasakan makanan terhambat dan butiran padi menjadi hampa.

Pengendalian

- a. Membakar sisa jerami, menggenangi sawah, menanam varitas unggul Sentani, Cimandirim IR 48, IR 36, pemberian pupuk N di saat pertengahan fase vegetatif dan fase pembentukan bulir;
- b. Menyemprotkan insektisida Fujiwan 400 EC, Fongorene 50 WP, Kasumin 20 AS atau Rabcide 50 WP.

10. Penyakit garis coklat daun (Narrow brown leaf spot,)

Penyebab: jamur *Cercospora oryzae*.

Gejala: menyerang daun dan pelepah. Tampak gari-garis atau bercak-bercak sempit memanjang berwarna coklat sepanjang 2-10 mm. Proses pembungaan dan pengisian biji terhambat.

Pengendalian

- a. Menanam padi tahan penyakit ini seperti Citarum, mencelupkan benih ke dalam larutan merkuri.
- b. Menyemprotkan fungisida Benlate T 20/20 WP atau Delsene MX 200.

11. Busuk pelepah daun

Penyebab: jamur *Rhizoctonia* sp.

Gejala: menyerang daun dan pelepah daun, gejala terlihat pada tanaman yang telah membentuk anakan dan menyebabkan jumlah dan mutu gabah menurun. Penyakit ini tidak terlalu merugikan secara ekonomi.

Pengendalian

- a. Menanam padi tahan penyakit ini;
- b. Menyemprotkan fungisida pada saat pembentukan anakan seperti Monceren 25 WP dan Validacin 3 AS.

12. Penyakit fusarium

Penyebab: jamur *Fusarium moniliforme*.

Gejala: menyerang malai dan biji muda, malai dan biji menjadi kecoklatan hingga coklat ulat, daun terkulai, akar membusuk, tanaman padi. Kerusakan yang diderita tidak terlalu parah.

Pengendalian :

merenggangkan jarak tanam, mencelupkan benih pada larutan merkuri.

G. Panen Padi

1. Ciri dan Umur Panen

Padi siap panen: 95 % butir sudah menguning (33-36 hari setelah berbunga), bagian bawah malai masih terdapat sedikit gabah hijau, kadar air gabah 21-26 %, butir hijau rendah.

2. Cara Panen

Keringkan sawah 7-10 hari sebelum panen, gunakan sabit tajam untuk memotong pangkal batang, simpan hasil panen di suatu wadah atau tempat yang dialasi.

Panen dengan menggunakan mesin akan menghemat waktu, dengan alat Reaper binder, panen dapat dilakukan selama 15 jam untuk setiap hektar sedangkan dengan Reaper harvester panen hanya dilakukan selama 6 jam untuk 1 hektar.

Perkiraan Produksi. Dengan penanaman dan pemeliharaan yang intensif, diharapkan produksi mencapai 7 ton/ha. Saat ini hasil yang didapat hanya 4-5 ton/ha.

H. Pasca Panen

Perontokan. Lakukan secepatnya setelah panen, gunakan cara diinjak-injak (± 60 jam orang untuk 1 hektar), dihempas/dibanting (± 16 jam orang untuk 1 hektar) dilakukan dua kali di dua tempat terpisah. Dengan menggunakan mesin perontok, waktu dapat dihemat. Perontokan dengan perontok pedal mekanis hanya memerlukan 7,8 jam orang untuk 1 hektar hasil panen.

Pembersihan. Bersihkan gabah dengan cara diayak/ditapi atau dengan blower manual. Kadar kotoran tidak boleh lebih dari 3 %.

Jemur gabah selama 3-4 hari selama 3 jam per hari sampai kadar airnya 14 %. Secara tradisional padi dijemur di halaman. Jika menggunakan mesin pengering, kebersihan gabah lebih terjamin daripada dijemur di halaman.

Penyimpanan. Gabah dimasukkan ke dalam karung bersih dan jauhkan dari beras karena dapat tertulari hama beras. Gabah siap dibawa ke tempat penggilingan beras (huller).

B. Pembangunan Ekonomi Daerah

1. Pengertian

Setiap upaya pembangunan ekonomi daerah mempunyai tujuan utama untuk meningkatkan jumlah dan jenis peluang kerja untuk masyarakat daerah. Dalam upaya untuk mencapai tujuan tersebut, pemerintah daerah dan masyarakat harus secara bersama-sama

mengambil inisiatif pembangunan daerah. Oleh karena itu, pemerintah daerah beserta partisipasi masyarakatnya dan dengan menggunakan sumberdaya yang ada harus menafsir potensi sumberdaya yang diperlukan untuk merancang dan membangun perekonomian daerah.

Menurut Arsyad (2010), pembangunan ekonomi daerah diharapkan merangsang perkembangan kegiatan ekonomi (pertumbuhan ekonomi) dalam wilayah tersebut.

Suatu daerah ditinjau dari **aspek ekonomi**, mempunyai 3 pengertian yaitu :

- a. Suatu daerah dianggap sebagai **ruang yaitu kegiatan ekonomi** terjadi di dalam berbagai pelosok ruang tersebut terdapat **sifat-sifat yang sama** seperti segi pendapatan perkapitanya, sosial budaya, geografisnya dan sebagainya. Daerah ini disebut **daerah homogen**.
- b. Suatu daerah dianggap sebagai suatu ekonomi ruang yang dikuasai oleh satu atau beberapa pusat kegiatan ekonomi daerah. Daerah ini disebut **daerah nodal**.
- c. Suatu daerah adalah suatu ekonomi ruang yang berada di bawah suatu administrasi tertentu seperti satu propinsi, kabupaten, kecamatan dsb didasarkan pada pembagian administratif suatu negara. Daerah ini disebut **daerah perencanaan** atau **daerah administrasi**.

Strategi pembangunan ekonomi di masa lalu telah mengubah struktur ekonomi secara mengesankan dan mencapai tingkat pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi. Namun, perubahan struktur ekonomi ini

hanya terjadi pada level nasional, sedangkan pada level daerah secara agregat relatif stagnan, terutama daerah-daerah di luar pulau Jawa. Ini berarti bahwa peranan dan partisipasi daerah dalam pembangunan ekonomi nasional belum optimal.

2. Strategi Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi

Pada hakekatnya pembangunan ekonomi adalah serangkaian usaha dan kebijaksanaan yang bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat, memperluas lapangan kerja dan pemerataan pembagian pendapatan masyarakat. Kinerja pembangunan ekonomi mempunyai kedudukan yang amat penting, karena keberhasilan di bidang ekonomi dapat menyediakan sumber daya yang lebih luas bagi pembangunan di bidang lainnya. Namun sebaliknya untuk melakukan pembangunan ekonomi diperlukan landasan yang kuat, yaitu pengambilan kebijakan yang tepat, akurat dan terarah, supaya hasil yang dicapai akan benar-benar sesuai dengan yang direncanakan.

Adapun strategi untuk mengembangkan kinerja ekonomi daerah, ditetapkan langkah-langkah sebagai berikut :

- a. Strategi Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi,
- b. Strategi Peningkatan Kemakmuran Ekonomi,
- c. Strategi Memperkuat Struktur Perekonomian.

C. Ketahanan Pangan Daerah.

Ketahanan pangan didefinisikan sebagai kondisi terpenuhinya pangan bagi rumah tangga yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik

jumlah maupun mutunya, aman, merata dan terjangkau. Hingga saat ini ketahanan pangan daerah masih merupakan isu strategis bagi peran pemerintah daerah mengingat kecukupan produksi, distribusi dan konsumsi pangan mempunyai dimensi yang sangat luas dan terkait dengan dimensi sosial, ekonomi dan politik.

Ketahanan pangan merupakan suatu sistem yang terintegrasi yang terdiri atas berbagai subsistem diantaranya ketersediaan pangan, distribusi pangan dan konsumsi pangan. Terwujudnya ketahanan pangan merupakan sinergi dari interaksi ketiga sub sistem tersebut. Mengenai ketersediaan pangan hal tersebut mencakup aspek produksi, cadangan serta keseimbangan antara impor dan ekspor pangan. Ketersediaan pangan harus dikelola sedemikian rupa sehingga walaupun produksi pangan bersifat musiman, terbatas dan tersebar antar wilayah, tetapi volume pangan yang tersedia bagi masyarakat harus cukup jumlah dan jenisnya serta stabil penyediaannya dari waktu ke waktu. Mengenai distribusi pangan hal tersebut mencakup aspek aksesibilitas secara fisik dan ekonomi atas pangan secara merata. Sistem distribusi ini tentunya perlu dikelola secara optimal dan tidak bertentangan dengan mekanisme pasar terbuka agar tercapai efisiensi dalam proses pemerataan akses pangan bagi seluruh penduduk. Sedangkan masalah konsumsi pangan hal tersebut menyangkut upaya peningkatan pengetahuan dan kemampuan masyarakat agar mempunyai pemahaman atas pangan, gizi dan kesehatan yang baik. Impor pangan yang dilakukan pemerintah setiap tahunnya merupakan upaya didalam menjamin ketersediaan pangan nasional, tetapi sampai kapan negara akan bergantung kepada negara luar didalam memenuhi kebutuhan pangan nasional. Untuk itu perlu upaya peningkatan

produksi pangan dalam negeri yang salah satunya dapat dilakukan dengan peningkatan pembangunan sektor pertanian.

Selain itu pemantapan ketahanan pangan juga tidak terlepas dari penanganan kerawanan pangan karena kerawanan pangan merupakan penyebab penting instabilitas ketahanan pangan. Kerawanan pangan dapat disebabkan karena adanya kendala yang bersifat kronis seperti terbatasnya sumber daya dan kemampuan pangan. Untuk mengatasi hal tersebut pemerintah dan masyarakat perlu membangun suatu sistem kewaspadaan, yang mampu mendeteksi secara dini adanya gejala kerawanan pangan di daerah masing-masing serta dapat meresponnya dengan cepat dan efektif. Penanganan yang cepat dan tepat sangat diperlukan untuk menghindarkan masyarakat tersebut dari kerawanan yang lebih parah, dengan segala dampak yang mengikutinya.

Berikut dapat dilihat peta ketahanan dan kerentanan pangan yang disajikan oleh badan ketahanan pangan agar diketahui kekuatan ketahanan pangan Indonesia pada saat ini.

permasalahan ketahanan pangan harus menjadi prioritas daerah dengan penggeraknya adalah pemerintah daerah. Karena sebenarnya Pemda lah yang lebih mengetahui kondisi sebenarnya tentang potensi dan keunggulan komoditi pangan yang dimiliki daerah masing-masing, tentunya hal tersebut dilakukan juga dengan dukungan dari pihak terkait seperti kelompok tani, pertanian daerah dan seluruh elemen masyarakat daerah.

D. Pembangunan Sektor Pertanian Daerah

Sebagai salah satu prioritas kebijakan untuk mewujudkan misi Indonesia yang sejahtera, sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Nasional (RPJMN) 2010-2014, pembangunan sektor pertanian diharapkan dapat meningkatkan ketahanan pangan nasional.

Di sektor pertanian banyak sekali permasalahan yang dapat menghambat dalam meningkatkan jumlah produksi pangan, hal ini disebabkan oleh beberapa masalah diantaranya menurunnya jumlah sumber daya manusia petani serta masih rendahnya kualitas petani dalam hal informasi dan teknologi pertanian, lemahnya akses modal yang didapat petani untuk mengembangkan usaha pertanian, berkurangnya lahan pertanian akibat adanya alih fungsi lahan untuk pengembangan Industri dan pertanian dan masih kurangnya peran lembaga penunjang atau pendukung sektor pertanian.

Dengan memperhatikan permasalahan dan kondisi sektor pertanian seperti diuraikan diatas maka diperlukan kebijakan, strategi dan upaya didalam meningkatkan pembangunan sektor pertanian sehingga dapat meningkatkan ketahanan pangan nasional melalui beberapa hal sebagai berikut ;

- 1) Meningkatkan kapasitas sumber daya manusia petani melalui penyuluhan serta upaya meningkatkan kualitas SDM petani melalui kegiatan pendidikan dan pelatihan pertanian sehingga pengetahuan informasi dan teknologi pertanian dapat dikuasai oleh petani.
- 2) Penguatan peran lembaga ekonomi petani melalui peningkatan modal usaha tani seperti Koperasi pertanian.
- 3) Penerapan inovasi teknologi budi daya pertanian dengan memanfaatkan lahan-lahan non produktif sehingga dapat dijadikan lahan produktif pertanian.
- 4) pembangunan dan pengembangan infrastruktur pertanian seperti lahan, air, jalan desa, perluasan areal panen serta infrastruktur perbenihan.

- 5) Peningkatan kerjasama pemanfaatan dan perluasan kredit pertanian melalui lembaga keuangan mikro di pedesaan.
- 6) Penyediaan bantuan benih atau bibit kepada petani dan pemberdayaan kelembagaan perbenihan/ Perbibitan.
- 7) Pengembangan sistem cadangan pangan dan pemberdayaan pangan lokal serta mutu dan keamanan pangan.
- 8) Pengembangan Pertanian Terpadu dengan tetap memperhatikan Lingkungan Hidup.

Pembangunan sektor pertanian yang merupakan salah satu unsur peningkatan produksi pangan guna menjamin ketersediaan pangan melalui beberapa upaya diatas tentunya akan dapat meningkatkan ketersediaan pangan sehingga pada akhirnya akan meningkatkan pula ketahanan pangan nasional.

E. Kebijakan Pemerintah Daerah

Kebijakan Pemerintah daerah bagaimana mengambil sebuah keputusan atau tindakan sebagaimana dijelaskan Tati Nurmala dkk., (2012: 151) menjelaskan bahwa Kebijakan pemerintah adalah intervensi pemerintah untuk mengubah perilaku produsen dan konsumen. Komponen Kerangka Kerja (*Frame Work*) Kebijakan

Tati Nurmala dkk., (2012:151) menyebutkan beberapa Kerangka kerja kebijakan terdiri dari empat komponen yaitu :

1. Tujuan (*objectives*) adalah tujuan yang di harapkan bisa di capai oleh sebuah kebijakan ekonomi yang di buat oleh para pembuat kebijakan.
2. Kendala adalah suatu keadaan (ekonomi) yang membuat apa yang bisa di capai menjadi terbatas.

3. Kebijakan (*Policies*) terdiri dari berbagai instrumen yang bisa di gunakan pemerintah untuk mengubah keluaran (*outcome*) perekonomian.

4. Strategi adalah seperangkat instrument kebijakan yang di gunakan oleh pemerintah untuk mencapai tujuan (*objektive*) yang telah ditetapkan.

Semakin kompleksnya kegiatan ekonomi dan semakin tingginya keterkaitan dengan aspek-aspek kehidupan lainnya, sangat sulit bagi suatu sistem ekonomi

termasuk yang paling liberal sekalipun untuk menolak kehadiran peran negara atau pemerintah dalam perekonomian.

Walaupun mekanisme pasar merupakan cara yang dikehendaki dalam memproduksi dan mengalokasikan barang, akan tetapi, mekanisme pasar sering gagal berfungsi. Kegagalan pasar akan mengurangi hasil ekonomi. Untuk memperbaiki kegagalan tersebut, seringkali menuntut campur tangan pemerintah untuk menjamin adanya efisiensi, pemerataan, dan stabilitas ekonomi.

F. Peranan Masyarakat Petani

Petani adalah seseorang yang bergerak di bidang bisnis pertanian utamanya dengan cara melakukan pengelolaan tanah dengan tujuan untuk menumbuhkan dan memelihara tanaman seperti (padi, bunga, buah dan lain lain), dengan harapan untuk memperoleh hasil dari tanaman tersebut untuk digunakan sendiri ataupun menjualnya kepada orang lain. Pada umumnya petani di Indonesia merupakan kelompok masyarakat mayoritas yang tertindas. Tertindas di sini dalam arti yang sangat luas. Petani-petani kita adalah orang-orang yang tidak memiliki kekuatan ataupun akses apapun untuk memberdayakan dirinya meskipun petani bisa melakukannya.

Ketiadaan kekuatan untuk memberdayakan ini jelas terlihat dari berbagai kebijakan yang belum memihak kepada petani ditambah lagi dengan adanya pelaksanaan kebijakan yang banyak penyimpangannya.

Banyak macam bentuk-bentuk ketertindasan petani. Pertama, petani tidak memiliki daya tawar sedikitpun terhadap hasil pertaniannya. Setiap kali ada hasil panen, petani mengalami kerugian karena harga langsung anjlok. Seakan-akan mekanisme pasar betul-betul menghukum para petani. Hukum pasar yang berbunyi "ketika jumlah barang meningkat maka harga akan turun" benar-benar merupakan contoh nyata betapa kejamnya kita, manusia yang tidak "mengatasi" hukum itu. Tidak ada kebijakan untuk hal ini. Sekalipun ada semua adalah dalam nuansa eksploitasi kelemahan petani.

Kedua, petani tidak memiliki akses terhadap sumber-sumber produksi dan pasar secara bebas, seperti pupuk dan pestisida.

Dalam upaya pemberdayaan pemerintah terhadap bagi para petani dalam meningkatkan hasil panen petani dengan memberikan bantuan pupuk dan bibit kepada petani, dan membimbing petani untuk mengupayakan perbaikan nasib petani, mulai dari bimbingan teknis pertanian secara modern.

Sebagai negara yang mempunyai potensi sumber daya alam yang sangat melimpah seharusnya Indonesia menjadi salah satu negara yang kaya karena sumber daya alam yang ada dapat di manfaatkan dan menghasilkan suatu komoditi alam yang sebenarnya lebih baik dari negara-negara yang biasanya kita ekspor. Sehingga dapat meningkatkan perekonomian negara. Namun apa faktanya Indonesia masih banyak melakukan impor. Berbagai bahan makanan pokok pun lebih sering impor dari pada mengekspor. Hal ini dapat di kaitkan dengan seberapa besar kita menghargai peranan petani dan menghargai

hasil-hasil pertanian para petani lokal. Tidak hanya itu juga harus menelaah tentang seberapa besar pemerintah dalam membangun pertanian di Indonesia dan seberapa besar pemerintah di dalam membantu sarana maupun prasarana para petani lokal terutama petani kecil.

G. Produktifitas Petani

Produktifitas petani merupakan suatu upaya pemerintah daerah dalam peningkatan produksi pertanian bisa disebabkan oleh berbagai hal. Faktor yang bisa dikendalikan oleh manusia antara lain, penyiapan lahan dan cara budidaya yang benar, cara panen yang tepat dan pengolahan pasca panen yang bagus. Semua hal tersebut memiliki konten teknologi. Bicara teknologi dibidang pertanian terkadang ada yang menggunakan teknologi tinggi, namun ada juga yang menggunakan teknologi sederhana. Bahwa teknologi di pertanian harus mendorong peningkatan produktivitas.

Di Indonesia masih cukup banyak petani yang mengeluhkan tingkat produktivitas atau hasil panen. Namun demikian jarang diantara mereka yang mau melakukan evaluasi dan introspeksi. Melakukan aktivitas pertanian dari mulai pengolahan hingga pemanenan masih mengikuti cara-cara masa lampau. Informasi yang diperolehpun terkadang juga tidak utuh. Perlunya peran aktif penyuluh pertanian terutama dari pemerintah untuk menyampaikannya dan melakukan kontrol tentunya.

Hanya sebagian kecil introduksi pertanian yang dijalankan oleh petani. Itupun membutuhkan waktu yang lama. Sehingga sering sekali ketinggalan jaman. Dibeberapa waktu lalu, kami cukup kaget bahwa istilah pemupukan berimbang ternyata belum banyak dimengerti oleh petani.

Jika kenyataannya bahwa salah satu sebab produktivitas pertanian meningkat dikarenakan pemberian nutrisi yang tepat untuk tanaman tidak dilakukan dengan benar, maka apa yang terjadi? Tentunya bisa jadi pemborosan penggunaan pupuk dan input lainnya. Ujung-ujungnya petani yang akan rugi.

Budidaya yang benar tentu memerlukan ilmu dan pemahaman sendiri. Membiarkan petani melakukannya sendiri juga tidak bagus. Petani harus selalu didampingi dan mulai diperkenalkan dengan cara penyiapan lahan garap yang optimal. Misalnya dengan pemberian bahan-bahan organik dari pupuk organik maupun limbah pertanian yang sudah terdekomposisi. Pengukuran tingkat keasaman tanah atau ukur kesuburan tanah, prediksi pemupukan yang tepat dengan pengukur tes kadar hara dengan peralatan yang sederhana dan praktek yang terkoordinasi.

Menggunakan benih atau bibit yang bagus dan memiliki potensi produksi yang tinggi. Hal ini tidak berarti harus memilih benih yang mahal. Memperhatikan kesesuaian benih yang cocok dengan ketinggian lahan dan lokasi, iklim dan jaminan keabsahan benih. Benih yang bagus biasanya dicirikan dengan viabilitas yang tinggi dan cenderung seragam saat tumbuh. Pola tanam yang menggunakan kaidah teknologi atau teknik yang tepat. Misal pada tanam padi sawah menggunakan jarak legowo, pada tanaman hortikultura mengikuti jarak tanam yang sesuai dengan petunjuk di pembungkus benih.

Perawatan tanaman yang rutin dan teliti juga mampu meningkatkan produktivitas. Pengendalian organisme pengganggu dengan prinsip Pengendalian Hama Terpadu (PHT) dengan mengutamakan penggunaan

pengendali alami jauh lebih bagus dibanding menggunakan pestisida dari bahan kimia. Selain ramah lingkungan biasanya akan lebih ekonomis. Yang tak kalah pentingnya untuk diperhatikan adalah cara panen dan penanganan pasca panen. Jadwal panen yang tepat dengan cara yang benar secara nyata mampu meningkatkan produksi. Petani padi biasanya akan berpotensi mengalami kehilangan hasil panen hingga 20% saat tidak menggunakan *trasher* (perontok padi). Pada masa sekarang ini untuk meningkatkan produktifitas hasil pertanian sebaiknya menggunakan alat pertanian seperti mobil panen, agar meningkatkan hasil peroduksi panen padi dan waktu yang lebih efisien. Petani komoditas hortikultur seperti cabe, tomat, dan sebangsanya berpotensi kehilangan hasil secara akumulasi saat melakukan panen tidak tepat waktu.

H. Tinjauan Empiris

Penelitian yang dilakukan oleh Syaifuddin, Arif (2013) tentang “strategi pengembangan sektor pertanian sub sektor tanaman pangan dalam upaya peningkatan PDRB kabupaten Pati “ bahwa sub sektor tanaman pangan yang memiliki keunggulan komperatif di tiap kecamatan di kabupaten Pati dapat dijadikan sebagai penyedia bahan baku untuk industri pertanian sehingga dapat memberikan nilai tambah dari produksi-produksi pertanian dan dapat memacu pertumbuhan ekonomi daerah serta peningkatan kesejahteraan masyarakat.

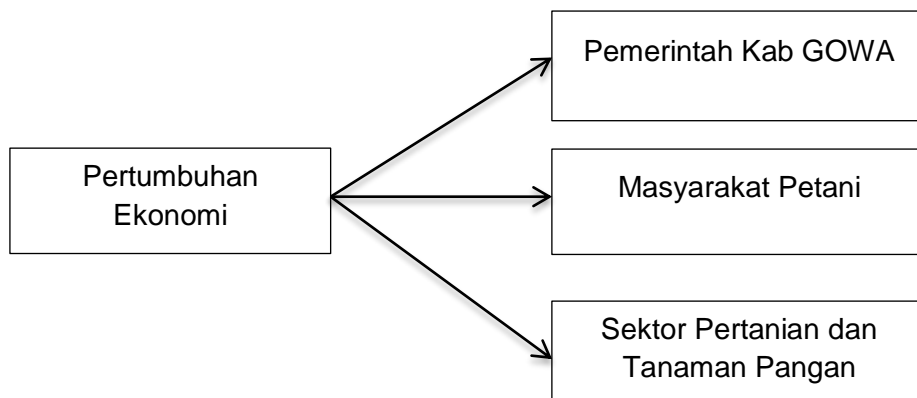
I. Kerangka Konsep

Pemerintah dalam hal ini khususnya Pemerintah Daerah memegang peranan penting dalam pembangunan daerah yang bersangkutan melalui

semua bidang yang ada untuk mencapai pertumbuhan yang diharapkan sekaligus untuk menunjang pertumbuhan nasional terutama pertumbuhan ekonomi.

Pertanian sebagai salah satu sektor memiliki peran yang sangat berarti, oleh karena itu diperlukan penanganan oleh pemerintah untuk mengatur, mengalokasikan serta pendistribusian hasil-hasil pertanian terutama yang dilaksanakan oleh masyarakat agar pertumbuhan ekonomi dapat sesuai harapan, yang berarti akan meningkatkan perekonomian masyarakat.

Melalui penelitian ini akan dilihat kaitan dari peranan pemerintah daerah dalam berupaya meningkatkan ekonomi sektor pertanian. Kerangka konsep ini digambarkan sebagai berikut.



Gambar 1 Bagan Kerangka Konsep

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Waktu Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah Deskriptif melalui metode survey yaitu bertujuan untuk mengumpulkan data dan informasi dari sejumlah responden atau informan yang dianggap dapat memberikan informasi yang berhubungan dengan peran pemerintah dan masyarakat dalam Meningkatkan Ekonomi Daerah sektor pertanian di Kabupaten Gowa. Adapun penelitian dilakukan selama kurang lebih dua bulan yang berlokasi di Dinas pertanian Kabupaten Gowa.

B. Pengumpulan Data

Untuk kepentingan penelitian ini maka dikumpulkan data Primer dan Sekunder. Data primer dikumpulkan melalui pencatatan langsung pada Dinas Pertanian kabupaten Gowa melalui instrumen pencatatan dan wawancara. Sedangkan data sekunder dikumpulkan melalui data-data publikasi dan dokumen berkaitan dengan perekonomian daerah yaitu Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dan Pendapatan Asli daerah (PAD) khususnya sektor pertanian di kabupaten Gowa dari tahun 2014 sampai 2017 termasuk data yang berasal dari Badan Pusat Statistik (BPS).

C. Definisi Operasional Variabel

Berdasarkan obyek penelitian tentang peran pemerintah dalam meningkatkan produktifitas hasil dalam meningkatkan perekonomian Kabupaten Gowa. terdapat beberapa variabel yang akan dijelaskan dengan indikatornya masing-masing :

a. Peranan Pemerintah Daerah

Peranan pemerintah dalam melalui aktifitas merencanakan, membimbing, dan mengarahkan terhadap jalannya roda perekonomian demi tercapainya tujuan pembangunan serta peningkatan ekonomi.

b. Peningkatan Ekonomi Sektor Pertanian

Perkembangan ekonomi khususnya di sektor pertanian melalui peranan yang dilakukan oleh pihak pemerintah, yakni melalui Dinas pertanian setempat.

D. Metode Analisis

Analisis data yang dilakukan adalah secara deskriptif yaitu menggambarkan kondisi secara faktual tentang peranan pemerintah lalu dikaitkan peningkatan ekonomi sektor pertanian sehingga diperoleh satu kesatuan dan keterkaitan kedua variabel tersebut secara kualitatif. Metode analisis yang digunakan adalah secara survey yaitu bertujuan untuk mengumpulkan data dan informasi dari sejumlah responden atau informan yang dianggap dapat memberikan informasi yang berhubungan dengan peran pemerintah dan masyarakat dalam Meningkatkan Ekonomi Daerah sektor pertanian di Kabupaten Gowa.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Kabupaten Gowa

Kabupaten Gowa berada pada 12°38.16' Bujur Timur dari Jakarta dan 5°33.6' Bujur Timur dari Kutub Utara. Sedangkan letak wilayah administrasinya antara 12°33.19' hingga 13°15.17' Bujur Timur dan 5°5' hingga 5°34.7' Lintang Selatan dari Jakarta.

Kabupaten yang berada pada bagian selatan Provinsi Sulawesi Selatan ini berbatasan dengan 7 kabupaten/kota lain, yaitu di sebelah Utara berbatasan dengan Kota Makassar dan Kabupaten Maros. Di sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Sinjai, Bulukumba, dan Bantaeng. Di sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Takalar dan Jeneponto sedangkan di bagian Barat berbatasan dengan Kota Makassar dan Takalar.

Luas wilayah Kabupaten Gowa adalah 1.883,33 km² atau sama dengan 3,01% dari luas wilayah Provinsi Sulawesi Selatan. Wilayah Kabupaten Gowa terbagi dalam 18 Kecamatan dengan jumlah Desa/Kelurahan definitif sebanyak 167 dan 726 Dusun/Lingkungan. Wilayah Kabupaten Gowa sebagian besar berupa dataran tinggi berbukit-bukit, yaitu sekitar 72,26% yang meliputi 9 kecamatan yakni Kecamatan Parangloe, Manuju, Tinggimoncong, Tombolo Pao, Parigi, Bungaya, Bontolempangan, Tompobulu dan Biringbulu. Selebihnya 27,74% berupa dataran rendah dengan topografi tanah yang datar meliputi 9 Kecamatan yakni Kecamatan Somba Opu, Bontomarannu, Pattallassang, Pallangga,

Barombong, Bajeng, Bajeng Barat, Bontonompo dan Bontonompo Selatan.

Dari total luas Kabupaten Gowa, 35,30% mempunyai kemiringan tanah di atas 40 derajat, yaitu pada wilayah Kecamatan Parangloe, Tinggimoncong, Bungaya, Bontolempangan dan Tompobulu. Dengan bentuk topografi wilayah yang sebahagian besar berupa dataran tinggi, wilayah Kabupaten Gowa dilalui oleh 15 sungai besar dan kecil yang sangat potensial sebagai sumber tenaga listrik dan untuk pengairan. Salah satu diantaranya sungai terbesar di Sulawesi Selatan adalah sungai Jeneberang dengan luas 881 Km² dan panjang 90 Km.

Di atas aliran sungai Jeneberang oleh Pemerintah Kabupaten Gowa yang bekerja sama dengan Pemerintah Jepang, telah membangun proyek multifungsi DAM Bili-Bili dengan luas + 2.415 Km² yang dapat menyediakan air irigasi seluas + 24.600 Ha, konsumsi air bersih (PAM) untuk masyarakat Kabupaten Gowa dan Makassar sebanyak 35.000.000 m³ dan untuk pembangkit tenaga listrik tenaga air yang berkekuatan 16,30 Mega Watt.

Curah hujan di Kabupaten Gowa yaitu 237,75 mm dengan suhu 27,125°C. Curah hujan tertinggi yang dipantau oleh beberapa stasiun/pos pengamatan terjadi pada Bulan Desember yang mencapai rata-rata 676 mm, sedangkan curah hujan terendah pada Bulan Juli – September yang bisa dikatakan hampir tidak ada hujan.

Untuk lebih jelasnya gambaran umum kecamatan yang ada dalam wilayah Kabupaten Gowa berdasarkan komposisi luas dan jarak dari

Sungguminasa sebagai Ibukota Kabupaten Gowa dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2
Ibu Kota Kecamatan, Jarak dan Luas Kecamatan Tahun 2017

No	Kecamatan	Ibukota Kecamatan	Jarak dari Ibukota Kab. (Km)	Luas Kecamatan (Km ²)	% Thd Luas Kab.
1.	Bontonompo	Tamallayang	16	30,39	1,61
2.	Bontonompo Selatan	Pabundukang	30	29,24	1,55
3.	Bajeng	Kalebajeng	12	60,09	3,19
4.	Bajeng Barat	Borimatangkasa	15,80	19,04	1,01
5.	Pallangga	Mangalli	2,45	48,24	2,56
6.	Barombong	Kanjilo	6,5	20,67	1,10
7.	Somba Opu	Sungguminasa	0,00	28,09	1,49
8.	Bontomarannu	Borongloe	9	52,63	2,79
9.	Pattallassang	Pattallassang	13	84,96	4,51
10.	Parangloe	Lanna	27	221,26	11,75
11.	Manuju	Bilalang	20	91,90	4,88
12.	Tinggi Moncong	Malino	59	142,87	7,59
13.	Tombolo Pao	Tamaona	90	251,82	13,37
14.	Parigi	Majannang	70	132,76	7,05
15.	Bungaya	Sapaya	46	175,53	9,32
16.	Bontolempangan	Bontoloe	63	142,46	7,56
17.	Tompobulu	Malakaji	125	132,54	7,04
18.	Biringbulu	Lauwa	140	218,84	11,62
JUMLAH				1.883,33	100

Secara geologi daerah ini tersusun oleh batuan-batuan sediment dan terobosan Formasi Camba yang berumur Tersier, batuan gunungapi dan terobosan yang termasuk dalam kelompok batuan Gunungapi Baturappe-Cindako berumur Tersier batuan Gunungapi Lompobatang yang berumur Kuartar, serta endapan alluvial.

Daerah dataran yang merupakan daerah terendah di atas permukaan laut, umumnya ditempati oleh endapan alluvial. Kelompok batuan Formasi Camba dan batuan gunungapi Tersier umumnya menempati daerah perbukitan dan hanya sebagian kecil yang berada di daerah dataran serta di daerah dataran bergelombang sedangkan daerah pegunungan yang merupakan bagian tertinggi dalam wilayah Kabupaten Gowa tersusun oleh batuan gunungapi Kuartar.

Daerah dataran yang umumnya tersusun oleh endapan alluvial merupakan wilayah air tanah produktivitas sedang-rendah. Sedangkan daerah yang tersusun oleh batuan sedimen Formasi Camba dan Batuan Gunungapi termasuk batuan terobosan berumur Tersier merupakan wilayah airtanah dengan produktivitas sangat rendah hingga langka airtanah. Daerah pegunungan termasuk wilayah airtanah produktivitas sedang kecuali sebagian daerah di sekitar puncak merupakan wilayah airtanah langka. Bahan galian berupa pasir dan lempung banyak ditambang di daerah dataran terutama di daerah Bajeng, sedangkan sirtu di daerah lembah sungai Jeneberang di bagian hulu bendung Bili-Bili. Daerah bergelombang sering dibuat menjadi lebih landai bahkan datar dengan menggalinya sebagai tanah urug dan batubelah terutama di daerah yang tersusun oleh endapan gunungapi Tersier. Formasi Camba

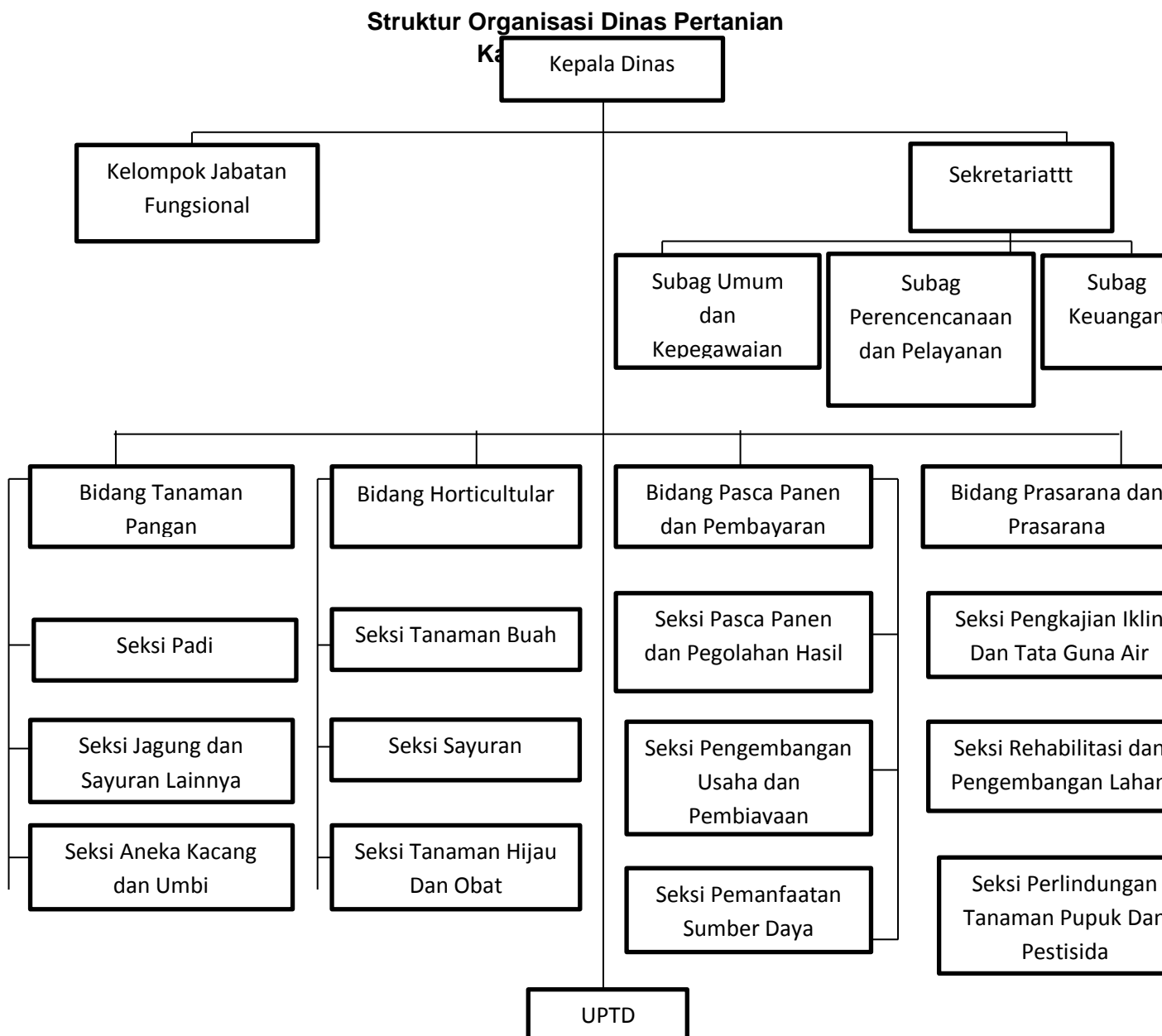
oleh para peneliti sebelumnya diinformasikan mengandung lapisan tipis batubara, sedangkan intrusi batuan gunungapi Baturappe-Cindako antara lain menghasilkan mineralisasi logam mulia. Dari segi kebencanaan, daerah Kabupaten Gowa ini tidak termasuk daerah yang rawan gempa bumi karena kondisi geologi lokal dan posisi tektoniknya yang jauh dari zona-zona sumber gempabumi. Daerah ini juga aman dari bencana gunungapi karena gunungapi terdekat yaitu Lompobattang sudah termasuk kategori padam. Namun beberapa tempat termasuk sangat rawan terhadap bencana gerakan tanah seperti di sebagian lereng gunung Bawakaraeng dan sebagian daerah perbukitan yang terjal. Selain itu daerah lembah sungai Jeneberang juga rawan terhadap bencana banjir bandang.

Analisis Geologi Lingkungan dan skoring setiap komponen geologi lingkungan yang dimiliki oleh semua daerah dan dianggap berpengaruh terhadap pengembangan wilayah menunjukkan nilainya berkisar antara 33-62 atau kurang leluasa hingga cukup leluasa untuk dikembangkan, kecuali daerah tertentu yang tersisihkan merupakan daerah yang tidak layak kembang.

Daerah yang cukup leluasa untuk dikembangkan direkomendasikan sebagai kawasan budidaya umum utamanya pertanian tanaman pangan semusim dan pengembangan kawasan non pertanian seperti pemukiman, perkantoran dan perdagangan. Sedangkan sebagian besar daerah yang agak leluasa lainnya dan daerah yang kurang leluasa untuk dikembangkan merupakan daerah yang direkomendasikan sebagai kawasan budidaya terbatas umumnya pertanian (termasuk hutan).

Adapun daerah yang tidak layak kembang maka direkomendasikan sebagai kawasan lindung. Daerah yang cukup leluasa untuk dikembangkan sebagian besar terletak di dataran Sungguminasa – Takalar, sedangkan yang tidak layak menempati daerah di sekitar puncak perbukitan dan pegunungan terjal, sempadan sungai, waduk/danau dan mata air.

B. Struktur Organisasi



Tugas pokok dan Fungsi masing-masing Bidang pada Dinas Pertanian dan Perkebunan di Uraikan sebagai berikut :

1. Kepala Dinas

Kepala Dinas mempunyai tugas pokok memimpin Dinas dalam menyelenggarakan koordinasi, pembinaan, pengawasan, dan pengendalian dalam penyelenggaraan kegiatan di Bidang Pertanian dan Perkebunan. Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, kepala Dinas mempunyai fungsi :

- a) Perumusan kebijaksanaan teknis bidang pertanian dan perkebunan
- b) Pembinaan perizinan dan pelaksanaan pelayanan umum lintas kabupaten/kota
- c) Penyelenggaraan pembinaan teknis di bidang pertanian dan perkebunan

2. Sekrteriat

Sekretariat mempunyai tugas merencanakan operasionalisasi, memberi tugas, memberi petunjuk, menyelia, mengafaluasi, dan melaporkan pelaksanaan tugas dan kesekretariatan. Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, sekretariat mempunyai fungsi :

- a) Penyusunan kebijakan tekhnis administrasi umum dan kepegawaian, administrasi keuangan dan perencanaan dinas
- b) Penyelenggaraan kebijakan administrasi umum dan kepegawaian dan perencanaan dinas
- c) Pembinaan, pengkoordinasian, pengendalian, pengawasan program dan kegiatan-kegiatan sub bagian
- d) Penyelenggaraan evaluasi program dan kegiatan lingkup dinas

3. Bidang Tanaman Pangan

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, bidang tanaman pangan mempunyai fungsi :

- a) Penyelenggaraan kegiatan perbenihan tanaman pangan
- b) Penyelenggaraan kegiatan peningkatan produksi tanaman pangan
- c) Penyelenggaraan kegiatan konservasi dan perlindungan tanaman pangan

4. Kepala Bidang Holtikultura

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, bidang holtikultura mempunyai fungsi :

- a) Penyelenggaraan kegiatan pembenihan
- b) Penyelenggaraan kegiatan peningkatan produksi holtikultura
- c) Penyelenggaraan kegiatan observasi dan perlindungan tanaman pangan holtikultura

5. Kepala Bidang Perkebunan

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, bidang perkebunan mempunyai fungsi :

- a) Penyelenggaraan perbenihan perkebunan
- b) Penyelenggaraan kegiatan peningkatan produksi perkebunan
- c) Penyelenggaraan kegiatan konservasi dan perlindungan tanaman perkebunan

6. Kepala Bidang Bina Usaha dan Penyuluhan

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, bidang bina usaha dan penyuluhan mempunyai fungsi :

- a) Penyelenggaraan kegiatan pengolahan dan pemasaran hasil pertanian dan perkebunan
- b) Penyelenggaraan kegiatan permodalan dan pengembangan usaha pertanian dan perkebunan
- c) Penyelenggaraan kegiatan kelembagaan dan tata penyuluhan pertanian dan perkebunan

7. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok jabatan fungsional, mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis administrasi sesuai bidang keahlian masing-masing. Kelompok jabatan fungsional dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang dibimbing oleh seorang tenaga fungsional senior selaku ketua kelompok yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada dinas.

C. Program Pemerintah Dalam Pembangunan

1. Peran Pemerintah Daerah Dalam Pendidikan dan Pelatihan

Peran pemerintah dalam pendidikan dan pelatihan adalah menggerakkan partisipasi multipihak dalam proses pembangunan. Dimana melibatkan 3 pihak yaitu melibatkan pemerintah, swasta, dan warga masyarakat. Sebagai pemerintah berperan memberikan pelaksanaan melalui pemberian bimbingan dan pengarahan yang intensif dan efektif kepada masyarakat.

Dalam rangka pelaksanaan pelatihan, pembimbingan dan pengarahan yang dilakukan pemerintah di kabupaten Gowa untuk

meningkatkan keterampilan para petani maka dilakukanlah penyuluhan yaitu melalui pemberian pedoman, bimbingan, pelatihan, arahan, dan supervise dimanapun dan kapan saja.

Peran pemerintah daerah melalui kepala cabang dinas pertanian sebagai memberikan pelaksanaan pelatihan dalam hal ini pemberian penyuluhan pertanian di kabupaten Gowa diharapkan dapat menimbulkan kesadaran dan partisipasi warga yang menjadi kunci keberhasilan pembangunan daerah tersebut termasuk pembangunan pada sektor pertanian khususnya petani tanaman pangan.

Kabupaten Gowa dalam pelaksanaan pendidikan dan pelatihan memberikan penyuluhan terhadap masyarakat yaitu dengan cara mengumpulkan kelompok tani dan masyarakat di tiap desa dan kelurahan. Untuk memberikan pengertian tentang kegiatan –kegiatan apa saja yang perlu dilaksanakan dan bagaimana pelaksanaannya di lapangan. Seperti bagaimana pemilihan bibit atau benih unggul yang cocok dengan cuaca, iklim, dan ph tanah. Apabila masyarakat telah memahami dan menegerti tentang hal tersebut maka pemerintah tinggal menggerakkan dan memberikan bimbingan bagaimana system pengelolaan pertanian.

Pemerintah daerah dalam hal ini dinas pertanian kabupaten Gowa melalui kepala cabang dinas pertanian memberikan tugas kepada penyuluh pertanian lapangan (PPL) dan lembaga-lembaga pertanian agar berperan aktif.

2. Peran Pemerintah Daerah Dalam Bantuan Modal Usaha

Peran pemerintah dalam bantuan modal usaha adalah menciptakan kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan pembangunan. Pemerintah kabupaten Gowa melalui kepala cabang dinas pertanian berusaha memfasilitasi para petani agar hasil produksi pertanian dapat meningkat. Peningkatan hasil adalah hal yang selalu diharapkan dalam kegiatan produksi pertanian. Berbicara suatu lokasi pertanian yang tetap maka upaya ini dekat dengan aspek intensifikasi pertanian. Intensifikasi pertanian adalah kegiatan peningkatan kuantitas dan kualitas bertani dengan berbagai sarana dan prasarana untuk meningkatkan hasil pertanian pada suatu daerah.

Pemerintah kabupaten Gowa melalui kepala cabang dinas pertanian dalam upaya pemberian bantuan modal usaha berupa bantuan benih baik bantuan langsung (BLBU) maupun bantuan benih bersubsidi dan bantuan modal usaha yang di berikan kepada kelompok tani melalui gabungan kelompok tani (Gapoktan) juga bantuan simpan pinjam dengan sumber anggaran perusahaan pemberdayaan agrobisnis pedesaan (PUAP).

Mayarakat petani telah terbantu oleh pemerintah daerah dalam hal ini dinas pertanian melalui kepala cabang dinas pertanian telah memberikan bantuan modal berupa bibit, pupuk, pestisida sampai dengan perbaikan prasarana, akan tetapi belum optimal dilaksanakan karena masih banyak kelompok tani yang belum mendapatkan bantuan ditiap desa maupun kelurahan di kabupate Gowa.

Setiap aktivitas tersebut tidaklah terlepas dari bantuan modal pertanian untuk memudahkan jalannya proses produksi sampai pada

pasca produksi. Bantuan modal yang dimaksud adalah bantuan dana dan alat mesin pertanian. Dengan penggunaan dan bantuan alat mesin yang tepat diharapkan terjadinya efektivitas dan efisiensi proses produksi sampai pada pasca produksi sehingga hasil pertanian pun dapat meningkat produksinya. Dengan bantuan modal dan alat mesin maka kegiatan dalam bertani akan semakin cepat.

3. Peran Pemerintah Daerah Dalam Distribusi Bantuan Pupuk

Peran pemerintah kabupaten Gowa melalui kepala cabang dinas pertanian dalam rangka pemberdayaan masyarakat petani salah satu peran pemerintah yaitu pendistribusian pupuk, merupakan bahan yang sulit dipisahkan dari kebutuhan petani, dalam penyaluran bantuan kepada masyarakat melalui penyuluh pertanian lapangan kepada gabaungan kelompok tani (Gapoktan) keseluruhan desa maupun kelurahan. Akan tetapi dalam penyaluran bantuan secara bertahap agar dapat merata kepada setiap desa maupun kelurahan yang ada di kabupaten Gowa.

D. Faktor-faktor Pendukung dalam Meningkatkan Perekonomian pada sub sektor Pertanian

1. Peningkatan Ekonomi Sektor Pertanian

Secara umum perekonomian daerah Kabupaten Gowa didominasi sektor pertanian, khususnya pertanian tanaman pangan seperti padi, jagung selanjutnya dan hortikultura. Sasaran pokok yang harus dicapai adalah peningkatan produktifitas dan kualitas tanaman pangan dalam mencapai hal tersebut Dinas Pertanian Kabupaten Gowa telah menerapkan paradigma baru pembangunan pertanian yakni :

- a. Pengembangan perbenihan berbasis teknologi, pengolahan dan pemasaran hasil pertanian
- b. Keberpihakan kepada petani, dengan menempatkan mitra (petani) sebagai subyek, pendelegasian kewenangan dan tanggung jawab kepada unit-unit pelaksana teknis dinas (UPTD) yang berorientasi pada penjualan hasil pertanian untuk mendapatkan PAD pada sektor pertanian
- c. Pemberdayaan masyarakat pertanian khususnya para pelaku agribisnis.), yakni Para pelaku agribisnis itu sendiri meliputi yang bergerak pada sub sistem hulu(upstream), yakni industri input dan sarana; sub sistem usahatani (on-farm), yakni kegiatan yang menggunakan input, sarana dan sumberdaya alam untuk menghasilkan komoditas pertanian primer; sub sistem pengolahan hilir (downstreamindustri yang mengolah komoditas pertanian primer menjadi produk antara atau produk akhir; sub sistem pemasaran (marketing), yakni kegiatan untuk memperlancar pemasaran komoditas pertanian baik segar maupun olahan; sub sistem jasa yakni penyediaan data bagi sub sistem hulu ke hilir, seperti penelitian dan pengembangan, perkreditan (perbankan), asuransi, transportasi, penyuluhan, sistem informasi dan dukungan kebijakan pemerintah dalam penggunaan lahan pertanian sebagaimana terdapat pada tabel 5.1

Table 5.1
Luas lahan sawah menurut jenis pengairan dikabupaten Gowa
(ha)

KECAMATAN	JENIS PENGAIRAN			
	IRIGASI	TADAH HUJAN	RAWA PASANG SURUT	JUMLAH LUAS LAHAN SAWAH
1. BONTONOMPO	1655	940	-	2 595
2. BONTONOMPO SELATAN	562	1556	-	2 118
3. BAJENG	3112	153	-	3 265
4. BAJENG BARAT	1425	45	30	1 500
5. PALLANGGA	2680	58	-	2 738
6. BAROMBONG	1539	111	-	1 650
7. SOMBAOPU	1067	81	-	1 148
8. BONTOMARANNU	645	308	-	953
9. PATTALLASSANG	657	1270	-	1 927
10. PARANGLOE	446	583	60	1 089
11. MANUJU	320	1649	-	1 969
12. TINGGIMONCONG	939	414	-	1 353
13. TOMBOLO PAO	956	1429	-	2 385
14. PARIGI	806	450	-	1 256
15. BUNGAYA	1446	492	-	1 938
16. BONTO LEMPANGAN	1775	562	-	2 337
17. TOMPOBULU	2573	-	-	2 573
18. BIRING BULU	551	780	-	1 331
Kabupaten Gowa 2016	23154	10881	90	34 125

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Gowa, Hasil Pengolahan Laporan

SP.VA Dinas kabupaten Gowa

Sehubungan dengan penggunaan lahan di kabupaten Gowa, maka kebijakan dan program disusun lebih akurat dan tajam dalam upaya mewujudkan sasaran teknis berupa peningkatan produksi berbagai komoditas tanaman pangan, Hortikultura,serta peningkatan pendapatan masyarakat pertanian, disamping sasaran fungsional berupa meningkatnya efektivitas dan efisiensi manajemen pembangunan dan meningkatkan swadaya dan peran serta masyarakat dalam kegiatan pembangunan, yang ditunjang dengan potensi sumber daya alam pertanian yang sangat

potensial menghasilkan produk yang berdaya saing tinggi terutama dalam menghadapi perilaku pasar yang semakin mengglobal.

Kontribusi Pendapatan Asli Daerah pada Sektor Pertanian Kabupaten Gowa adalah merupakan sektor yang sangat menjanjikan terhadap pendapatan yang besar jika dikelola dengan baik dan benar sebagaimana sebagai berikut:

Table 5.2
Luas Panen, Produksi Dan Hasil Perhektar Tanaman Pangan Di Kabupaten Gowa, 2012 -2015

JENIS TANAMAN	2012	2013	2014	2015	2016
1. PADI SAWAH					
- LUAS PANEN (Ha)	56 990	61 139	60 139	63 253	63 255
- PRODUKSI (Ton)	352 887	380 458	382 137	401 979	401 979
- RATA – RATA (Kw)	61, 92	57,67	63, 42	63, 55	63,54
2. JAGUNG					
- LUAS PANEN (Ha)	44 289	42 289	41 808	44 799	24 658
- PRODUKSI (Ton)	234 764	241 778	239 631	262 298	262 298
- RATA – RATA (Kw)	58, 27	56,76	57,32	58,55	106,37
3. KEDELE					
- LUAS PANEN (Ha)	1 640	860	6 676	471	-
- PRODUKSI (Ton)	2 583	2 136	8 077	585	-
- RATA – RATA (Kw)	16,10	24,84	14,23	12,42	-
4. KACANG TANAH					
- LUAS PANEN (Ha)	423	520	358	765	7 056
- PRODUKSI (Ton)	814	1 010	686	967	973
- RATA – RATA	19,24	19, 43	19,16	13,70	0,13
5. KACANG HIJAU					
- LUAS PANEN (Ha)	3 058	2 842	4 645	55 224	5 518
- PRODUKSI (Ton)	2 676	2 460	3 829	6 848	6 848
- RATA – RATA (Kw)	8,75	8,66	8,24	12,40	12,41
6. UBI KAYU					
- LUAS PANEN (Ha)	10 824	9 756	13 444	8 221	8221
	246 072	225 432	320 632	223 901	223 961

- PRODUKSI (Ton)	227, 34	231,51	238,49	272,33	27,24
- RATA – RATA (Kw)					
7. UBI JALAR					
- LUAS PANEN (Ha)	471 5 564	421 5 072	341 4 053	401 6 970	401 8 414
- PRODUKSI (Ton)	118,13	120,77	118,85	401,2	209,8
- RATA – RATA (Kw)					

Sumber : Dinas Pertanian Kabupaten Gowa

Dari tabel tersebut membuktikan akan peranan pemerintah daerah dalam pemanfaatan lahan di kabupaten Gowa dalam meningkatkan ekonomi daerah serta produktivitas hasil pertanian untuk meningkatkan ekonomi daerah di Kabupaten Gowa. Tabel berikut mengenai pendapatan asli daerah sebagai berikut:

Tabel 5.3

Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Gowa Dari Tahun 2011-2015

NO.	TAHUN	PAD KABUPATEN GOWA (RP)	SUMBANGAN SEKTOR PERTANIAN (RP)	SUMBANGAN SEKTOR PERTANIAN (PERSENTASE)
1.	2011	15,200.000,000,00	6,460,000,000	42,5%
2.	2012	16,400.000,000,00	6,691,200,000	40,8%
3.	2013	17,400.000,000,00	7,186,500,000	41,3%
4.	2014	27,500.000,000,00	11,742,500,000	42,7%
5.	2015	42,300.000,000,00	18,696,600,000	44,2%

Sumber Data : PEMDA Kabupaten Gowa

Tabel 5.3 menunjukkan bahwa pendapatan asli daerah di kabupaten Gowa mengalami peningkatan yang signifikan setiap tahunnya, yaitu dari tahun 2011 dengan persentase 42,5%, kemudian tahun selanjutnya 2012 dengan persentase 40,8%, 2013 dengan persentase 41,3%, 2014 dengan persentase 42,7 % dan

pada tahun terakhir yang telah di targetkan mengalami peningkatan 2015 dengan persentase 44,2%.

Secara keseluruhan dapat dikatakan bahwa pertumbuhan yang terjadi fluktuatif namun relatif mengalami peningkatan.

Tabel 5.4
Perkembangan PDRB Kabupaten Gowa

NO.	TAHUN	PDRB SUL-SEL (JUTAAN RP)	PDRB KABUPATEN GOWA (JUTAAN RP)	PERANAN PDRB GOWA TERHADAP PDRB SUL-SEL
1.	2011	99.707.775,80	1.532.794,97	
2.	2012	117.612.050,92	1.831.773,14	1,61%
3.	2013	137.146.162,09	2.181.112,64	1,63%
4.	2014	159.427.096,96	2,536.709,90	1,63%
5.	2015	184.255.886,02	2.950.882,41	1,63%
RATA –RATA		-	-	1,62%

Sumber : BPS kabupaten Gowa

Kontribusi PDRB kabupaten Gowa terhadap PDRB Sulawesi Selatan pada tahun 2014 meningkat dibanding tahun sebelumnya yaitu dari 1,63 persen di tahun 2015 menjadi 1,64 persen pada tahun 2015

2. Perkembangan Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten Gowa

secara umum, pertumbuhan ekonomi di definisikan sebagai peningkatan dalam kemampuan dari suatu perekonomian dalam memproduksi barang dan jasa dengan kata lain, pertumbuhan ekonomi lebih menuju pada perubahan yang bersifat kuantitatif dan biaya di ukur dengan menggunakan data produk domestic bruto (PDB) atau pendapatan output perkapita. Produk domestic bruto (PDB) adalah total nilai pasar dari barang–barang akhir dan jasa-jasa yang dihasilkan dalam suatu perekonomian selama kurun waktu tertentu (biasanya satu tahun). Tingkat pertumbuhan ekonomi menunjukkan persentasi kenaikan pendapatan nasional rill pada tahun sebelumnya.

Masalah pertumbuhan ekonomi dapat di pandang sebagai masalah makro ekonomi dalam jangka panjang. Perkembangan kemampuan memproduksi barang dan jasa sebagai akibat penambahan factor-faktor produksi pada umumnya tidak selalu di ikuti oleh pertambahan produksi barang dan jasa ang sama besarnya. Pertambahan potensi memproduksi seringkali lebih besar dari pertambahan produksi yang sebenarnya.

Pertumbuhan ekonomi dapat di artikan juga sebagai proses kenaikan kapasitas produksi suatu perekonomian yang dapat diwujudkan dalam bentuk kenaikan pendapatan nasional. Perkonomian dikatakan mengalami pertumbuhan apabila jumlah balas jasa riil terhadap penggunaan faktor-faktor produksi pada tahun tertentu harus lebih besar dari pada tahun sebelumnya.

Table 5.5
Pertumbuhan Ekonomi Di Kabupaten Gowa

Tahun	PDRB (Milyar rupiah)
2012	215.340
2013	232.097
2014	170.144
2015	181.038
2016	196.534

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Gowa 2017

Berdasarkan table 5.5 di atas bahwa angka pertumbuhan ekonomi di kabupaten Gowa mengalami fluktuasi pertahunnya dari periode 2012 sampai dengan 2016.

E. Peran dan Arah Pemerintah Dalam Pelaksanaan Pembangunan Perekonomian di Kabupaten Gowa.

1. Tujuan Kebijakan Pemerintah dalam pelaksanaan pembangunan perekonomian di Kabupaten Gowa :

- a. Memajukan pertanian
- b. Mengusahakan agar pertanian menjadi lebih produktif
- c. Meningkatkan produksi dan efisiensi produksi
- d. Tingkat pendapatan petani meningkat
- e. Tingkat kesejahteraan petani dan masyarakat meningkat

2. Strategi kebijakan pemerintah dalam pelaksanaan pembangunan perekonomian di Kabupaten Gowa :

1. Usaha pengembangan ekonomi lebih difokuskan pada sektor yang menghidupi mayoritas penduduk yaitu penduduk di pedesaan yang berprofesi sebagai petani
2. Program industrialisasi mestinya difokuskan pada aktivitas yang memiliki keterkaitan dengan kepentingan mayoritas
3. Pendidikan menjadi pra-syarat utama pembangunan dan ini harus dapat dijangkau oleh golongan mayoritas
4. Dalam pembangunan pertanian, prioritas bukan sekedar memproduksi komoditi, tapi penciptaan nilai tambah (value added)
5. Industrialisasi harus terkait dengan kepentingan petani sebagian besar hasil pertanian terutama perkebunan masih diolah diluar Indonesia, misalnya karet, Clude Plam Oil/CPO, kakao, dll. Hal ini sebenarnya sangat mendukung industrialisasi, oleh karena itu sebaiknya produk bukan dijual sebagai barang mentah

6. Terkait dengan efisiensi, program swastanisasi/privatisasi perlu persiapan, karena liberalisasi yang terburu buru akan sangat berbahaya
7. Peran dan intervensi pemerintah untuk memberi prioritas pada “mayoritas” tetap diperlukan, bukan sepenuhnya diserahkan pada “market mechanism” (invisible hand).
8. Perlu keseimbangan antara kepentingan pasar dan campur tangan dan atau peran pemerintah.

3. Kebijakan/Arahan pemerintah Kabupaten Gowa Dalam Pelaksanaan dan Pembangunan di Kabupaten Gowa

a. Kebijakan Harga

Mempunyai tujuan sebagai berikut:

- 1) Mengurangi ketidakstabilan harga dan pendapatan
- 2) Memberikan manfaat kepada konsumen karena terjaminnya penawaran dan mencukupi kebutuhan bahan baku industri
- 3) Meningkatkan swasembada pangan sehingga mengurangi ketergantungan impor, menghemat devisa, dan memperbaiki neraca pembayaran
- 4) Menjaga stabilitas politik

2. Kebijakan Perdagangan

Tujuan dari kebijakan perdagangan ini adalah memperlancar atau menghambat pemasaran komoditi dari suatu wilayah ke wilayah yang lain.

Kebijakan perdagangan merupakan suatu pembatasan yang diberlakukan pada impor dan ekspor suatu komoditas. Untuk impor,

dengan pemberlakuan tarif impor dan kuota impor untuk membatasi jumlah yang diimpor dan meningkatkan harga domestik di atas harga dunia. Untuk ekspor, dengan pajak ekspor dan kuota ekspor untuk membatasi barang yang di ekspor dan mengkonsdisikan harga domestik yang lebih rendah dari harga dunia.

3. Kebijakan Subsidi

Contohnya adalah subsidi bagi petani, misalnya subsidi pupuk dan subsidi bagi agroindustri, misal subsidi minyak tanah, BBM. Hal ini berpengaruh pada penurunan biaya produksi dan meningkatkan penawaran.

4. Kebijakan Struktural

Kebijakan ini dapat berupa, Perbaikan prasarana pertanian, Pengenalan teknologi pertanian Penyuluhan pertanian dan Pengusahaan alat-alat pertanian

5. Kebijakan Pengaturan

Pelaksanaan kekuatan kebijaksanaan pemerintah dengan menggunakan UU, peraturan, ketetapan yang berkenaan dengan perekonomian dan niaga. Hal ini dimaksudkan untuk Pencegahan praktek persaingan tidak wajar dan monopoli yg tidak wajar serta Pengaturan kelancaran perdagangan dan jasa yg diperlukan.

F. Manfaat Sektor Pertanian Bagi Masyarakat

Manfaat dari pertanian itu sendiri bagi masyarakat jika diperhatikan sangat banyak. Sesuatu yang memiliki

konsep *sustainable* lebih cocok jika dibahas dengan memperhatikan waktu, karena memang manfaatnya akan dirasakan dalam jangka panjang. Setidaknya terdapat 5 manfaat utama pertanian bagi masyarakat, yaitu:

1. Produksi hasil pertanian yang stabil sepanjang tahun
2. Dapat mencegah terjadinya kerusakan lingkungan
3. Keuntungan ekonomi berupa penghematan biaya
4. Hasil produksi pertanian lebih sehat
5. Kelestarian ekologi tetap terjaga.

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Pemerintah Daerah Kabupaten Gowa telah melakukan upaya pembangunan ekonomi khususnya di sektor pertanian secara terkonsep atau terencana dan hasilnya adalah bahwa pertumbuhan ekonomi di sektor pertanian mengalami pertumbuhan yang fluktuatif sehingga boleh dikatakan bahwa Pemerintah daerah setempat relatif memiliki peran yang cukup baik namun belum maksimal yang disebabkan oleh beberapa faktor jika dibandingkan dengan wilayah daerah lainnya, diantaranya adalah bahwa Kabupaten Gowa memiliki penduduk yang relatif kecil dengan wilayah pertanian yang tidak terlalu luas, namun sebagian besar penduduknya bekerja di sektor pertanian terutama tanaman pangan. Pemerintah daerah setempat telah melakukan upaya-upaya pembangunan pertanian termasuk industri sektor pertanian dengan melakukan perubahan-perubahan melalui diversifikasi dan intensifikasi pertanian serta penggalakan agribisnis. Indikator penting dari usaha Pemerintah dalam meningkatkan perekonomian daerah dapat dilihat dari pertumbuhan PDRB (*Product Domestic Regional Bruto*) serta keberhasilan dalam penerimaan dari Pendapatan Asli Daerah (PAD). Penilaian ini didasarkan pada pertumbuhan PDRB dan PAD yang merupakan ukuran pertumbuhan dan kinerja keuangan Pemerintah Daerah setempat.

B. Saran

Adapun saran yang penulis berikan berdasarkan hasil penelitian adalah sebagai berikut:

1. Diharapkan kepada pemerintah daerah di Kabupaten Gowa lebih meningkatkan lagi perannya dalam peningkatan ekonomi daerah dan sektor pertanian dalam menjamin kesejahteraan sosial bagi masyarakat Kabupaten Gowa.
2. Diharapkan kepada seluruh masyarakat agar dapat menjalin kerjasama yang lebih baik kepada pemerintah daerah serta pihak yang terkait dalam meningkatkan ekonomi daerah serta peningkatan hasil pertanian yang lebih berkualitas.

DAFTAR PUSTAKA

- Arsyad, Lincolin. 2010. *Ekonomi Pembangunan*. Edisi 5, Penerbit: AMP YKPN, Jogjakarta.
- Daniel, 2002. *Faktor-Faktor Produksi dalam Ilmu Ekonomi*. Bandung
- DKP.2008 *Kebijakan Umum Ketahanan Pangan 2006-2008*.
RPJMN.2010-2014 *Pembangunan Sektor Pertanian*
- Fitriani, Bella. 2013. *Ekonomi Pembangunan : Pembangunan Daerah*.
<http://belbellayy.blogspot.com/2013/12/ekonomi-pembangunan-pembangunan-daerah.html>
- Hafsah, M.J. dan T. Sudaryanto. 2004. *Sejarah Intensifikasi Padi dan Prospek Pengembangannya. Ekonomi Padi dan Beras Indonesia*. (Ed. F. Kasryno, et.ai., 2004). Badan Litbang Pertanian, Jakarta
- Hermanto. 1992. *Keragaan Penyaluran Kredit Pertanian: Suatu Analisis Data Makro. Perkembangan Perkreditan Pertanian di Indonesia* (Ed. A.H. Taryoto, 1992). Pusat Penelitian Sosial Ekonomi Pertanian, Bogor
- Nurmanaf, A.R., I W. Rusastra, V. Darwis, Y. Marisa, dan J. Situmorang. 2003. *Evaluasi Sistem Distribusi Benih dan Pupuk dalam Mendukung Ketersediaan dan Stabilisasi Harga di Tingkat Petani*. Pusat Litbang Sosek Pertanian, Bogor
- PSEKP. 2005. *Justifikasi Subsidi Benih. Pusat Analisis Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian*. Badan Litbang Pertanian, Bogor
- Simatupang, P. dan I W. Rusastra. 2004. *Kebijakan Ekonomi Perberasan Nasional. Ekonomi Padi dan Beras Indonesia*. (Ed. F. Kasryno, et.al., 2004). Badan Litbang Pertanian, Jakarta
- Simatupang, P. 2004. *Kembalikan Subsidi Pupuk kepada Petani*. Kompas, 19 Mei 2004. Jakarta
- Soentoro, Supriyati, dan E. Jama!. 1992. *Sejarah Perkreditan Subsektor Tanaman Pangan. Perkembangan Perkreditan Pertanian di Indonesia* (Ed. A.H. Taryoto, 1992). Pusat Penelitian Sosial Ekonomi Pertanian, Bogor
- Sudaryanto, T., N. Syafa'at, K. Kariyasa, Syahyuti, Azhari, dan M. Maulana. 2005. *Pandangan Pusat Analisis Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian Terhadap Kinerja Kebijakan Subsidi Pupuk Selama Ini dan Perbaikannya Ke Depan*. PSEKP, Badan Litbang Pertanian, Bogor
- Sumaryanto. 1992. *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Keputusan Petani untuk Meminjam Kredit Usahatani. Perkembangan Perkreditan Pertanian di*

Indonesia (Ed. A.H. Taryoto, 1992). Pusat Penelitian Sosial Ekonomi Pertanian, Bogor Waluyo dan A. Djauhari. 1992. *Kendala Penyaluran dan Pengembalian Kredit Usahatani. Perkembangan Perkreditan Pertanian di Indonesia* (Ed. A.H. Taryoto, 1992). Pusat Penelitian Sosial Ekonomi Pertanian, Bogor

pekalongankab.go.id dan disperta.bulungan.go.id

Id.Wikipedia. Org/Wiki/*Pemanfaatan Lahan Pertanian*.

Id. Wikipedia.Org/Wiki/*Geografi Indonesia*.

Malian,A Husni.Juni (2004).*kebijakan perdagangan internasional komoditas pertanian Indonesia*.Bogor

Mardikanto, 2009, *Peningkatan produksi pertanian dan penyuluhan pertanian*. Surabaya.

Mukhlis, Iman, *Peran Pajak Daerah Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah*

Ndraha, Talidizuhu. 2005. *Teori Budaya Organisasi*. Jakarta : Rhineka Cipta.

Notohaprawiro, Tejoyuwono.(2006). *pembangunan pertanian berkelanjutan*

Nurmala Tati dkk 2012. *Kebijakan pemerintah*, Jakarta

<http://arifgii.blogspot.com/2012/12/peran-dan-fungsi-pemerintah.html>.di ambil tanggal 15 januari 2015

Gowa dalam angka 2017

<http://firdafaizatulgomariyah.wordpress.com/2014/06/11/kebijakan-pemerintah-dalam-sektor-pertanian/>

www.slideshare.net/mobile/CuteEndangKurniasih/kebijakan-pemerintah-dalam-pembangunan-pertanian

BIOGRAFI PENULIS



Mutmainna panggilan Inna lahir di Borong Bilalang pada tanggal 19 Mei 1996 dari pasangan suami istri Bapak Sempo Dg. Ngempo dan Ibu Sayati. Peneliti adalah anak ketiga dari 3 bersaudara. Peneliti sekarang tinggal di Dusun Balangpunia, Desa Panaikang Kecamatan Pattalassang Kabupaten Gowa. Pendidikan yang telah ditempuh oleh peneliti yaitu SD Inpres Borong Bilalang lulus tahun 2007, SMP Negeri 2 Pallangga lulus tahun 2011, SMA Negeri 1 Pallangga lulus tahun 2014, dan mulai tahun 2014 mengikuti program S1 IESP Universitas Muhammadiyah Makassar (UMM) sampai dengan sekarang. Sampai dengan penulisan skripsi ini peneliti masih terdaftar sebagai mahasiswa program S1 IESP Universitas Muhammadiyah Makassar (UMM).